

BAB IV

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Virus Covid-19 pertama kali dilaporkan oleh China pada 31 Desember 2019. Kantor *World Health Organization* (WHO) di China mengetahui adanya penyakit sejenis pneumonia, yang menginfeksi dan menyerang paru-paru. Berawal dari kasus lokal tersebut, virus kemudian menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia.

International Labor Organization (ILO) menyebut virus Covid-19 telah memicu disrupsi besar-besaran di bidang sosial, politik, dan ekonomi dalam waktu singkat. Disrupsi atau perubahan secara fundamental ini kemudian mempertajam ketimpangan, khususnya kepada kelompok marginal yang kian rentan dan tersingkir.

Salah satu kelompok marginal yang menanggung resiko tidak proporsional dalam kondisi kedaruratan kesehatan ini adalah penyandang disabilitas atau difabel. Menurut pemberitaan Tempo, jumlah penduduk difabel yang terdata dalam Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2015 berjumlah 21,84 juta atau sekitar 8,56 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Sementara itu, menurut survei yang diselenggarakan oleh Jaringan Difabel Indonesia (JDI), sebanyak 81 persen difabel mengalami dampak negatif akibat pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 yang memberikan dampak begitu besar pada kelompok difabel menjadi topik pemberitaan media massa. Salah satu media *online* arus

utama yang memberikan perhatian khusus pada isu disabilitas selama pandemi Covid-19 adalah Tempo.co. Selama rentang waktu Maret hingga September 2020, Kanal Difabel Tempo.co telah memproduksi 34 artikel berita. Peneliti memilih 4 berita untuk dianalisis menggunakan perangkat *framing* model Robert N. Entman, serta melakukan analisis konteks dengan mengolah hasil wawancara dengan jurnalis dan redaktur Kanal Difabel Tempo.co.

Berdasarkan analisis teks dan konteks, hasil penelitian menunjukkan Kanal Difabel Tempo.co menampilkan difabel aktif dalam pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan akibat pandemi Covid-19, Kanal Difabel Tempo.co menilai pemerintah abai pada difabel selama pandemi Covid-19, serta Kanal Difabel Tempo.co memberi ruang yang besar pada difabel untuk menyampaikan suaranya sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian dan panduan peliputan disabilitas Dewan Pers & ILO, serta UNESCO, Kanal Difabel Tempo.co telah memenuhi standar-standar yang ditetapkan meski tetap ada catatan terkait aksesibilitas situs, dan keberagaman gender serta etnis difabel.

B. Saran

Peneliti merasa bahwa penelitian ini tidak sempurna, baik dari segi data, maupun analisis. Pada proses wawancara dengan subjek penelitian, peneliti menemui kesulitan dalam menggali informasi. Peneliti menyarankan agar peneliti lain melakukan analisis teks terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara untuk analisis level konteks. Dengan begitu peneliti memiliki daftar pertanyaan yang

terarah setelah mengolah hasil temuan dari analisis level teks. Sebab wawancara dengan subjek penelitian bertujuan untuk mengkonfirmasi temuan yang ada, serta menggali informasi tentang objek penelitian.

Penelitian ini terbatas pada *framing* media dalam pemberitaan difabel di masa pandemi Covid-19. Penelitian dapat dikembangkan oleh peneliti lain dengan lingkup *framing* yang berbeda, seperti membedah *audiences framing* yang terbentuk dari *media framing*.



DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU

Dewan Pers & ILO. (2014). *Panduan Peliputan Disabilitas di Indonesia*. Jakarta:

ILO Publication

Eddyono, Suzanna., Ayu Diasti Rahmawati., dkk, (2020). *Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia Kajian Awal*. Sleman: UGM Press

Eriyanto. (2002). *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS

Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Scheufele, Dietram A. (1999). *Framing As Theory of Media Effects*. Journal of Communication. International Communication Assosiation

Shoemaker & Reese. (1996). *Mediating the Message: Theories of Influences on Mass Media Content*. New York: Longman Publisher

Sobur, Alex. (2012). *Analisis Teks Media Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Sudibyo, Agus. (2001). *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Yogyakarta: LKiS

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

Zen, Fathurin. (2004). *NU POLITIK: Analisis Wacana Media*. Yogyakarta: LKiS

SUMBER ONLINE

Akbar, Ferdhinand. (2019). *Live Streaming Peluncuran Kanal Difabel Tempo*.

(Diakses dari <https://video.tempo.co/read/13587/live-streaming-peluncuran-kanal-difabel-tempo> 20 Juli 2022)

Abdi, Alfian. (2020). *Anak Difabel Ganda Positif Covid-19 Ditolak Dirawat di*

Wisma Atlet. (Diakses dari <https://tirto.id/anak-difabel-ganda-positif-covid-19-ditolak-dirawat-di-wisma-atlet-eUuf> pada 15 Februari 2021)

Baskara, Bima. (2020). *Rangkaian Pertama Peristiwa Covid-19*. (Diakses dari

<https://bebas.kompas.id/baca/riset/2020/04/18/rangkaian-peristiwa-pertama-covid-19/> pada 1 November 2020)

CNN. (2020). *7 Bulan Pandemi, Kasus Covid September Tembus Rekor Tertinggi*.

(Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200930162904-20-552823/7-bulan-pandemi-kasus-covid-september-tembus-rekor-tertinggi> pada 7 November 2020)

CNN. (2020). *Kalangan Tunarungu Minta Jokowi Sertakan Juru Bahasa Isyarat*.

(Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200317185836-20-484310/kalangan-tunarungu-minta-jokowi-sertakan-juru-bahasa-isyarat> pada 3 Januari 2021)

Felia. (2020). *Analisis Framing Isu Disabilitas dalam Masa Covid-19 di*

Newsdifabel.com dan Tempo.co periode 21 Maret - 7 April 2020. (Diakses dari <https://kc.umn.ac.id/15131/> pada 16 Agustus 2022)

Hapsari. Twediana. (2013). *Audiens Framing: Peluang Baru dalam Penelitian*

Audiens. (Diakses dari

<https://jurnalaspikom.org/index.php/aspikom/article/view/54/53> pada 3 Juni 2021)

Ihsanuddin. (2020). *Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia*.

(Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia?page=all> pada 1 November 2020)

JDI. (2020). *Laporan Asesmen Cepat Dampak Covid-19 bagi Penyandang*

Disabilitas yang Bergerak dan yang Terpapar di Masa Pandemi. (Diakses dari <https://ncovid19.sigab.or.id/2020/06/09/yang-bergerak-dan-yang-terdampak-di-masa-pandemi-suara-disabilitas-dari-indonesia/> pada 6 November 2020)

Kompas TV Youtube. (2020). *Inspiratif! Penyandang Difabel Produksi Masker*

Gratis. (Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=GdOviYA0PSY> pada 15 Agustus 2021)

Kurnia, Novi, dkk. (2021). *Modul Jurnalisme Inklusif: Liputan tentang Perempuan,*

Anak, dan Difabel Selama Pandemi. (Diakses dari

https://acadstaff.ugm.ac.id/karya_files/modul-jurnalisme-inklusif--liputan-tentang-perempuan--anak--dan-difabel-selama-pandemi-dcfcd07e645d245babe887e5e2daa016 pada 16 Desember 2021)

Laporan Tahunan Tempo 2019. (Diakses dari

<https://cms.tempo.id/uploads/file/1/5/15.pdf>)

- Nilawaty, Cheta. (2019). *Berapa Banyak Penyandang Disabilitas di Indonesia? Simak Data Ini*. (Diakses dari <https://difabel.tempo.co/read/1266832/berapa-banyak-penyandang-disabilitas-di-indonesia-simak-data-ini/full&view=ok> pada 2 November 2020)
- Nilawaty, Cheta. (2020). *Survei: 81 Persen Difabel Mengalami Dampak Negatif Covid-19*. (Diakses dari <https://difabel.tempo.co/read/1351634/survei-81-persen-difabel-mengalami-dampak-negatif-covid-19/full&view=ok> pada 3 November 2020)
- Pratiwi, Cynthia. (2021). *Konstruksi Realitas Pemberitaan Disabilitas pada Masa Pandemi Covid-19 di Korantangerang.com dan Tempo.co Periode Maret-Oktober 2020*. (Diakses dari <https://kc.umh.ac.id/18042/> pada 16 Agustus 2022)
- Rahmawatie, Aulia Diza. (2017). *Advokasi Hak Informasi Kelompok Difabel di Yogyakarta melalui Solider.id*. (Diakses dari <http://e-journal.uajy.ac.id/15452/> pada 20 Juli 2022)
- Rahmi, Ramadhany. (2020). *Apresiasi dan Kendala Juru Bahasa Isyarat di Konferensi Pers Covid-19*. (Diakses dari <https://www.solider.id/baca/5810-apresiasi-kendala-juru-bahasa-isyarat-konferensi-pers-covid19> pada 15 Februari 2021)
- Remotivi. (2020). *Indeks Media Inklusif: Rapor Jurnalisme Daring dalam Pemberitaan Kelompok Marginal di Indonesia*. (Diakses dari <https://imi.remotivi.or.id/> pada 30 Desember 2020)

Tuneva, Marina. (2020). *Guidelines for Inclusive Media Reporting on Covid-19*.

(Diakses dari

https://fr.unesco.org/sites/default/files/guide_inclusivemediareporting_covid19.pdf pada 7 Juni 2021)

UNESCO. (2021). *Equip Journalism Students Write Accurately about Vulnerable*

Groups. (Diakses dari <https://en.unesco.org/news/equip-journalism-students-write-accurately-about-vulnerable-groups> pada 25 Juli 2021)





LAMPIRAN

Coding Sheet Analisis Framing Robert N. Entman

Analisis Berita 1

Judul Berita: **Corona, Presiden Jokowi Mesti Perhatikan Difabel di Panti Sosial**

Tanggal: 29 Maret 2020

Penulis: Cheta Nilawaty

Elemen Framing Robert N. Entman		Indeks
<i>Define Problem</i>	Komunitas difabel yang tergabung dalam Perhimpunan Jiwa Sehat mendesak Presiden Jokowi memperhatikan difabel yang tinggal di panti sosial selama wabah corona berlangsung.	(p.1, k.1-2) "Penyandang disabilitas yang tergabung dalam Perhimpunan Jiwa Sehat mendesak Presiden Joko Widodo lebih memperhatikan kondisi difabel mental intelektual yang berada di panti sosial saat wabah corona. Permintaan ini disampaikan melalui surat yang dikirimkan Perhimpunan Jiwa Sehat pada Kamis, 26 Maret 2020.
<i>Diagnose Causes</i>	Penyebabnya , kondisi difabel di panti sosial yang rentan terpapar virus corona	(p.2, k.1-3) "'Kondisi penyandang disabilitas mental terutama yang berada di panti-panti swasta ini sangat rentan," kata Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat, Yeni Rosa Damayanti kepada Tempo, Sabtu 28 Maret

		2020. Difabel mental intelektual yang ditempatkan di panti swasta umumnya tinggal berdesakan dalam bangsal yang dihuni hingga 50 orang. Di beberapa tempat, mereka tidur, makan, sampai buang air besar atau kecil di tempat yang sama. (p.4, k.1-3) “Perhimpunan Jiwa Sehat mengkhawatirkan kondisi penghuni panti yang memiliki penyakit bawaan, namun harus tinggal berdesakan dan berdekatan satu sama lain. Selain penyakit bawaan, nutrisi yang diterima penghuni panti tidak selalu memenuhi kebutuhan gizi sesuai standar kesehatan untuk menjaga daya tahan tubuh. "Kondisi kian mengkhawatirkan manakala penghuni panti-panti sosial pada umumnya tidak memiliki akses informasi mengenai virus corona," ujar Yeni.
	Penyebab lainnya, jumlah difabel yang tinggal di panti sosial cukup banyak	(p.3, k.1-2) “Data Perhimpunan Jiwa Sehat menunjukkan terdapat sekitar 3.000 penyandang disabilitas mental yang ada di tiga panti sosial milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan

		ratusan yang berada di dalam panti-panti milik swasta. Sedangkan di Kota dan Kabupaten Bekasi ada ribuan penyandang disabilitas mental yang berada dalam panti-panti sosial milik swasta.
	Dampaknya , apabila difabel di panti sosial dibiarkan maka ada potensi difabel terpapar virus dan menimbulkan korban jiwa	(p.5, k.1) “Jika kondisi itu dibiarkan tanpa perhatian dari pemerintah, menurut Yeni, maka ribuan penyandang disabilitas mental intelektual di dalam panti-panti itu terancam jiwanya karena berpotensi terinfeksi virus corona.
<i>Moral Judgement</i>	Landasan hukum tentang perlindungan bagi difabel selama wabah corona	(p.6, k.1-2) “Dalam surat kepada Presiden Joko Widodo itu, Perhimpunan Jiwa Sehat juga memaparkan dasar hukum yang perlindungan bagi penyandang disabilitas oleh pemerintah dalam menghadapi wabah corona. Pemerintah wajib memenuhi hak atas kesehatan (<i>right to health</i>) fisik dan mental setiap orang tanpa kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant on Economic,

		Social, and Cultural Rights-ICESCR). (p.7, k.1) “Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 20 mengamanatkan penyandang disabilitas berhak mendapatkan informasi, pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana, mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana, serta mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses.
<i>Treatment Recommendation</i>	Negara wajib melindungi dan menjamin keselamatan difabel selama wabah corona	(p.8, k.1) “Perlindungan bagi penyandang disabilitas ini juga diperkuat dalam CRPD Pasal 11 yang mewajibkan negara mengambil semua kebijakan yang diperlukan untuk menjamin perlindungan dan keselamatan penyandang disabilitas dalam situasi berisiko seperti virus corona baru atau COVID-19 yang menjadi wabah global saat ini.

Analisis Berita 2

Judul: **Pandemi Covid-19, Ojek Difabel Difa Bike Bikin Layanan Blanja.in**

Tanggal: 18 April 2020

Penulis: Pribadi Wicaksono

Elemen Framing Robert N. Entman		Indeks
<i>Define Problem</i>	Sejumlah kelompok UMKM difabel di wilayah DIY telah merumuskan strategi pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.	(p.1, k.1) “Sebanyak 500 difabel yang bergerak di bidang usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Yogyakarta perlahan mempersiapkan diri menghadapi new normal.” (p.2, k.1-2) “Ketua Perkumpulan Pengusaha Disabilitas Indonesia atau Perpindo DI Yogyakarta, Bambang Susilo mengatakan perekonomian kelompok UMKM harus terus berputar di masa new normal meski pandemi Covid-19 belum berakhir. "Kelompok UMKM difabel di lima kabupaten/kota telah merumuskan strategi dalam upaya pemulihan di masa new normal," kata Bambang Susilo di Yogyakarta, Kamis 25 Juni 2020.”
<i>Diagnose Causes</i>	Penyebabnya , pandemi Covid-19	(p.3, k.2) “Wabah corona yang merebak pada

		Maret lalu membuat berbagai proyek kontruksi macet.
	Dampaknya , difabel kehilangan mata pencaharian	(p.4, k.1) “Kondisi ini mengakibatkan sekitar 25 penyandang disabilitas daksa di lereng Gunung Merapi yang selama ini bekerja sebagai pemecah batu, kehilangan mata pencaharian mereka.
	Dampak lainnya, kesulitan meneruskan usaha	(p.8, k.1-3) “Seorang petani difabel asal lereng Gunung Merapi, Sukirno mengatakan selama masa tanam saat pandemi Covid-19 membuat dia kesulitan meneruskan usaha karena pasokan pupuk macet. "Pupuk biasanya diantarkan setiap masa awal tanam, tapi selama pandemi ini sama sekali tidak ada yang memasok," ujar Sukirno yang memiliki lahan setengah hektar itu. Akibat macetnya pasokan pupuk, maka hasil panen pun molor dari jadwal.”
<i>Moral Judgement</i>	Strategi sejumlah UMKM difabel di wilayah DIY	(p.3, k.1) “Kelompok UMKM difabel di wilayah Cangkringan, Kabupaten Sleman, menurut Bambang, kini kembali menekuni usaha mereka di bidang pengolahan pasir.”

		(p.4, k.2) “Para difabel di lereng Merapi tersebut mengolah bebatuan sisa erupsi menjadi pasir siap jual.” (p.5, k.1-2) “Adapun kelompok difabel di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, ujar Bambang, tengah mengajukan koperasinya menjadi penyedia layanan jasa transportasi di area Bandara Yogyakarta International Airport atau YIA. Koperasi difabel tersebut bakal menggandeng sejumlah mitra untuk menyediakan armada dan membuat layanan informasi bagi wisatawan yang membutuhkan rental kendaraan setiba di bandara.” (p.6, k.1-2) “"Koperasi difabel di Kulon Progo mati suri selama pandemi Covid-19," kata Bambang. Saat ini pengurus koperasi tersebut mengajukan diri dalam layanan rental 30 unit mobil untuk wisata di Bandara Yogyakarta International Airport atau Bandara YIA.” (p.7, k.1-2) “Sedangkan di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, Bambang
--	--	--

		melanjutkan, sejumlah petani dan peternak difabel dapat menjadi pemasok bahan pangan yang langsung disalurkan ke pasar dan konsumen. "Kami akan menggandeng Dinas Pertanian di Gunungkidul untuk menampung hasil panen dari kelompok petani dan peternak difabel," ujarnya."
<i>Treatment Recommendation</i>	Pelaku UMKM difabel perlu memiliki kemampuan manajerial yang baik, serta membuat koperasi sendiri	(p.9, k.1-2) "Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM) DI Yogyakarta, Srie Nurkyatsiwi menuturkan kelompok pelaku UMKM difabel masih perlu digenjot lebih soal manajerial dalam berusaha. "Kami mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah difabel ini masing-masing bisa memiliki koperasi supaya lebih kuat dalam usahanya," ujarnya."

Analisis Berita 3

Judul: **Tantangan Guru Mengajar Kelas Inklusi Selama Belajar Jarak Jauh**

Tanggal: 4 Juni 2020

Penulis: Cheta Nilawaty

Elemen <i>Framing</i> Robert N. Entman		Indeks
<i>Define Problem</i>	Para guru kesulitan mengajar kelas inklusi selama kebijakan PSBB berlangsung	(p.1, k.1) “Kesulitan melaksanakan kegiatan belajar mengajar selama Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB tidak hanya dirasakan oleh peserta didik, namun juga para guru.”
<i>Diagnose Causes</i>	Penyebabnya , para guru wajib menjalankan kelas inklusi selama pandemi	(p.2, k.2) “Ketua Yayasan Wahana Inklusif Indonesia, Tolhas Damanik menyatakan pada prinsipnya kegiatan belajar mengajar inklusif adalah amanat Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang Penyandang Disabilitas, serta tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pendidikan Inklusif.” (p.3, k.1) “Semua ketentuan itu memuat peran aktif guru dalam kegiatan belajar mengajar secara inklusif, termasuk saat mengajar secara daring,” kata Tolhas Damanik dalam diskusi mengenai

		pendidikan inklusif selama pandemi Covid-19 pada Jumat, 22 Mei 2020.”
	Dampaknya , para guru harus pandai mengubah sendiri metode mengajarnya, serta melibatkan orang tua dan pendamping siswa	(p.1, k.1) “Terutama untuk kelas inklusi , para guru harus memodifikasi cara penyampaian materi sekaligus bekerja sama dengan orang tua atau pendamping siswa berkebutuhan khusus.”
<i>Moral Judgement</i>	Tantangan yang harus dihadapi para guru ketika mengajar secara daring	(p.3, k.2) “. Beberapa tantangan dan kesulitan yang dihadapi guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara inklusif melalui media daring, pertama keterbatasan waktu untuk mengeksplorasi materi pelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus.” (p.4, k.1-2) “Tantangan kedua adalah keterbatasan pengetahuan dan keterampilan pengajaran jarak jauh yang inklusif bagi peserta didik dengan disabilitas. Tolhas melanjutkan, hambatan ketiga yang dialami guru ketika melaksanakan pendidikan inklusif jarak jauh adalah keterbatasan keterampilan dan pengetahuan mengenai penggunaan alat komunikasi yang terakses serta keterbatasan

		pengembangan media dan materi pembelajaran yang terakses.” (p.5, k.1) “Hambatan keempat adalah keterbatasan kemampuan pengembangan strategi pelibatan orang tua atau pendamping dan lingkungan dalam kegiatan belajar mengajar secara inklusif bagi peserta didik dengan disabilitas.”
<i>Treatment Recommendation</i>	Masukan dari Yayasan Wahana Inklusif untuk pemerintah	(p.6, k.1-2) “Sebab itu, Yayasan Wahana Inklusif Indonesia merekomendasikan pemerintah agar mengeluarkan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif saat pandemi dan setelah wabah corona berakhir. Pemerintah sebaiknya dapat menyelenggarakan program pelatihan dan membuat panduan bagi guru dalam merancang pendidikan inklusif bagi peserta didik dengan disabilitas di rumah.” (p.7, k.1-2) “Pemerintah juga diharapkan dapat memberikan panduan bagi orang tua dalam melakukan pendampingan tentang memanfaatkan media pembelajaran adaptif

		untuk peserta didik dengan disabilitas," kata Tolhas Damanik. "Dan satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah pengembangan skema komunikasi guru dan orang tua dalam pendidikan inklusif dari rumah." (p.8, k.1-2) "Tolhas Damanik menekankan perlunya aksesibilitas terhadap beberapa fasilitas pembelajaran, seperti media pembelajaran adaptif yang juga mudah dimengerti oleh guru dan orang tua. Penting juga hotline atau layanan pengaduan selama kegiatan belajar mengajar dilakukan dari rumah."
--	--	---

Analisis Berita 4

Judul: **Disabilitas, Informasi, dan Lingkup yang Kian Sempit Kala Pandemi Covid**

Tanggal: 10 September 2020

Penulis: Didit Hariyadi

Elemen Framing Robert N. Entman		Indeks
<i>Define Problems</i>	Difabel di Makassar, Sulawesi Selatan belum terpapar informasi terkait Covid-19.	(p.1, k.1-3) “Andi Ukhrawi tahu pandemi Covid-19 tengah berkecamuk di seluruh penjuru, termasuk Indonesia sejak pertengahan maret 2020. Gara-gara pagebluk, siswa sekolah luar biasa kelas IX di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, itu tak lagi bisa berangkat ke sekolah. Dalam sepekan, dia hanya satu kali berinteraksi dengan gurunya lewat video daring.” (p.2, k.1-4) “Remaja dengan disabilitas wicara ini pun tak leluasa ke luar rumah. Rutinitas salat lima waktu di masjid kini dilakukan di rumah. Harus pakai masker, rajin cuci tangan, dan menjaga jarak satu sama lain yang tentu sulit diterapkan saat dia harus ditemani pendamping. Dari semua aktivitasnya yang mendadak berubah, ada satu pertanyaan di benak Andi, sebenarnya apa itu Covid-19?”

<i>Diagnose Causes</i>	Penyebabnya, sosialisasi dari pemerintah belum efektif	(p.3, k.2) “Musababnya, menurut dia, belum ada sosialisasi tentang Covid-19 khusus untuk difabel di pemerintah Kota Makassar.” (p.4, k.2) “Menurut dia, edukasi atau sosialisasi tentang Covid-19 dari pemerintah belum efektif karena tak melibatkan organisasi difabel atau guru sekolah luar biasa.”
	Penyebab lainnya, media belum aksesibel terhadap difabel	(p.5, k.1-2) “Luthfi menjelaskan, penyandang disabilitas sensorik, yakni tuli dan netra paling terhambat dalam mendapatkan informasi. Berbagai media tayang atau informasi tentang virus corona baru ini belum terakses oleh aplikasi pembaca layar, alat penerjemah bahasa isyarat, subtitle, dan close caption.”
	Dampaknya, difabel tidak tahu tentang Covid-19 beserta dampaknya	(p.4, k.3) “Akibatnya, banyak penyandang disabilitas yang tak tahu apa dan dampak dari Covid-19.”
	Dampak lainnya, kesulitan mematuhi protokol kesehatan	(p.6, k.1-2) “Menurut Luthfi, difabel tuli dan netra yang beraktivitas dengan pendamping kesulitan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah Covid-19, khususnya ketentuan menjaga jarak satu sama lain. “Tidak mungkin saya menjaga jarak dengan pendamping

		sejauh tiga meter," kata pria 30 tahun ini."
	Dampaknya lainnya, difabel termakan berita hoax	(p.9, k1) "Kurangnya informasi dari pemerintah tentang apa dan bagaimana Covid-19 membuat difabel mencari sendiri, dan tak jarang terjebak pada informasi yang keliru atau hoax."
	Dampak lainnya, difabel mencari tahu sendiri dari sosialisasi daerah lain	(p.9, k.2-3) "Akhirnya kami mengetahui apa isi protokol kesehatan itu dari daerah lain," ucap Abdul Rahman. Dia pun menyampaikan informasi tersebut kepada berbagai kelompok difabel sesuai dengan ragam disabilitasnya."
<i>Moral Judgement</i>	Pemerintah kota Makassar mengabaikan kelompok difabel	(p.7, k.1-2) "Direktur Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan atau PerDIK, Abdul Rahman menganggap Pemerintah Kota Makassar mengabaikan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas dalam sosialisasi informasi tentang Covid-19. "Pemerintah hanya fokus pada masyarakat, melupakan kelompok rentan, yakni penyandang disabilitas," kata Abdul Rahman saat ditemui Tempo di kantornya di Kabupaten Gowa, Selasa 18 Agustus 2020."

	Jumpa pers pemerintah Makassar tidak menggunakan penerjemah bahasa isyarat	(p.8, k.1-2) “Keterbatasan informasi tentang virus corona baru bagi difabel, misalkan terjadi ketika jumpa pers virtual yang tanpa kehadiran penerjemah bahasa isyarat. Abdul Rahman membandingkan dengan Pemerintah Kota Surabaya yang menyederhanakan bahasa bagi disabilitas agar mudah dipahami. Begitu juga dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang telah menginformasikan tentang Covid-19 melalui penyederhanaan bahasa.”
	Relawan yang turun ke lapangan tidak diberi perlindungan yang cukup	(p.12, k.1-2) “PerDIK dan HWDI yang berinisiatif turun ke lapangan untuk melakukan sosialisasi pencegahan Covid-19 kepada penyandang disabilitas mengaku sulit menjangkau seluruh difabel. Alasannya, minim alat pelindung diri sehingga mereka juga berpotensi tertular Covid-19.”
	Menurut Satuan Tugas Penegakan Disiplin Covid-19, sosialisasi belum maksimal karena tidak ada payung hukum	(p.13, k.1-3) “Ketua Satuan Tugas Penegakan Disiplin Covid-19 Makassar, Muhammad Sabri mengatakan selalu melakukan sosialisasi protokol kesehatan, termasuk untuk penyandang disabilitas. “Kami melibatkan satuan tugas hingga ke tingkat rukun tetangga dan rukun

		warga atau RT dan RW," katanya. Hanya saja, Sabri mengaku belum maksimal karena tiada peraturan daerah yang menjadi payung hukum dan panduan."
	Menurut Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas PPPA, pemerintah selama ini terkendala perantara	(p.15, k.1-2) "Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas PPPA Kota Makassar, Makmur mengaku sulit menerapkan protokol perlindungan bagi disabilitas karena butuh pendamping yang bisa memahami mereka. Selama ini, pemerintah terkendala peran perantara, seperti penerjemah bahasa isyarat atau pendamping untuk melakukan sosialisasi terkait pandemi Covid-19 kepada difabel."
<i>Treatment Recommendation</i>	Difabel harus menjadi prioritas penanganan covid-19	(p.10, k.1-4) "Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Sulawesi Selatan, Maria Un mengatakan seharusnya difabel menjadi prioritas dalam penanganan Covid-19."Sebab mereka jauh lebih rentan tertular ketimbang non-difabel," katanya. Contoh difabel netra yang menggunakan perabaan untuk mengidentifikasi benda dan membutuhkan pendampingan. Mereka

		harus tahu dan memahami isi protokol kesehatan untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitarnya.”
	Penyediaan alat bantu bagi difabel	(p.11, k.2) “Tak cukup sosialisasi tentang Covid-19 ke berbagai kelompok masyarakat, Maria Un menyarankan pemerintah juga memperhatikan bagaimana supaya alat bantu yang dipakai penyandang disabilitas bersih dari virus.”
	Menjalankan instruksi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk melibatkan aktivis difabel	(p.16, k.1-3) “Dinas PPPA kemudian menjalankan instruksi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melibatkan aktivis difabel dalam melakukan sosialisasi protokol kesehatan mencegah penyebaran Covid-19. Mereka yang menyampaikan segala informasi tentang Covid-19 sehingga mudah dipahami oleh difabel sesuai dengan ragam disabilitasnya. "Metode sosialisasi ini memanfaatkan beragam sarana, mulai dari media sosial, temu virtual, sampai turun langsung ke lapangan," katanya.”

TRANSKRIP WAWANCARA CHETA NILAWATY

1. Tanggal: **14 Desember 2020**

Via: Zoom Meeting

P: Bisa diceritakan latar belakang pendidikan waktu kuliah dulu, dan bagaimana awal mula tertarik pada bidang jurnalistik?

N: Latar belakang pendidikan saya sebenarnya fakultas hukum, Universitas Padjajaran. Jadi S1 saya sebenarnya fakultas hukum, saya angkatan 2001, terus selesai di 2005. Waktu itu organisasi yang saya ikuti bukan organisasi populer di kampus mahasiswa hukum. Jadi waktu itu saya ambil persma yang anggotanya kalau nggak salah 5 orang per angkatan persma itu. Kan nggak populer. Yang namanya hukum itu biasanya ... band gitu gitu ya. Nah akhirnya saya pikir gini, sebelum saya memutuskan di Universitas Padjajaran ambil fakultas hukum saya tadinya kepingin ilmu komunikasi di Unpad, cuma saya masuknya di hukum. Yaudah akhirnya saya pikir waktu itu saya suka menulis. Ya menulisnya sih menulis ringan waktu itu, nggak berat. Jadi saya pikir yaudah lah untuk menyalurkan hobi awalnya, karena ini ekstrakurikuler kan. Lagi pula waktu itu menurut saya berguna untuk skill penulisan apa, skripsi atau sebagainya. Jadi saya memilih itu.

Setelah lulus, kalau di fakultas hukum kan setelah lulus harus ambil program profesi ya untuk jadi lawyer, nah sedangkan setelah lulus waktu itu saya ada himpitan ekonomi, jadi untuk membantu keluarga. Akhirnya saya memilih untuk cari kerja, mana yang duluan. Berbekal saya dulu persma, terus punya pengalaman di organisasi persma itu sekitar 3-4 tahunan, saya coba melamar ke Tempo. Waktu itu ada 3 media. Ada Detik, Tempo, sama Okezone kalau nggak salah. Kan waktu itu lagi booming online. Itu di tahun 2006. Jadi saya lulus 2005 bulan agustus, 2006 bulan januari itu saya mulai apply-apply ke media. Tadinya semua perusahaan saya apply, tapi yang hukum kok nggak ada yang nyangkut malahan. Yang nyangkut ini yang perusahaan-perusahaan media. Mungkin mereka lagi butuh tenaga kali ya. Jadi saya pikir bersambut nih sama cita-cita ya kan. Yasudah akhirnya waktu itu di

saat yang sama saya wawancara 2 media, Detik dan Tempo, tapi karena Tempo manggil duluan dan saya ingin kontrak duluan saya akhirnya di Tempo. Itu awalnya justru. Jadi bukan terbangun dari idealisme apa gitu, bukan. Karena waktu itu saya pengen cari pekerjaan duluan, dan kebetulan di bidang yang saya suka. Waktu itu saya suka bidang kewartawanan lah, dan tulis menulis. Walaupun kata temen saya sih gak harus jadi wartawan tapi saya sudah terlanjur jatuh cinta sama profesi itu ya waktu itu. Akhirnya tahun 2006 itu saya di Tempo.

Oh ya sebagai latar belakang saya dulu bukan difabel. Dulu saya melihat. Jadi saya baru kena musibah itu 2016 akhirnya buta karena sakit. Nah jadi waktu itu nggak ada halangan apa-apa untuk saya di Tempo sampai 2016. Jadi 10 tahun di Tempo baru buta. Nah kalau ditanya waktu itu ada pertanyaan apakah isu disabilitas saja? Engga. Sebenarnya sudah rolling rolling, sudah muter muter.

P: Jadi selama ini di Tempo aja ya mbak sampai sekarang?

N: Iya untuk perusahaan medianya di Tempo. Tapi waktu itu saya pernah kerja di CityBank di back officenya tapi berhenti. Nggak kuat. Cuma berapa ya, 4 bulan. Kalau saya sih lebih ke latar belakang praktis sih. Nggak ada idealis untuk oh harus di media ini, media ini, engga. Nah kebetulan di Tempo itu kerjanya. Jadi ya alhamdulillah selama ini ya. Pernah suatu kali kepingin pindah tapi gak tau kenapa balik lagi aja gitu. Jadi akhir-akhir waktu saya ditawari kerja saya balik ke Tempo lagi. Nggak ngerti saya juga kenapa. Padahal gajinya juga nggak gede-gede amat.

P: Kalau yang sekarang ini apakah mbak hanya fokus menulis di isu disabilitas?

N: Sebenarnya fokusnya di disabilitas ya. Tapi di Tempo kan saya di bawah ampuannya desk Gaya Hidup. Sebenarnya isu disabilitas kan lintas sektor ya, lintas isu. Tapi karena ini masalah manajemen perusahaan, memang saya berada di bawah editannya mbak Rini Kustiani. Beliau itu Redpelnnya Gaya Hidup. Jadi saya di bawah Gaya Hidup. Meskipun nanti ada isu nasionalnya, kriminalnya, isu internasionalnya ya kan. Kalau dilihat di berita yang ditulis di difabel.tempo.co itu. Tapi yang kebetulan mengedit itu mbak Rini di Gaya Hidup. Jadi kalau ditanya itu

kanalnya di bawah apa? di bawah Gaya Hidup, meskipun isunya lintas kanal. Ini masalah manajemen perusahaan aja sih.

P: Berarti kalau saya lihat kanal difabel itu di bawah gaya hidup, terus jurnalisnya siapa saja mbak yang ada di kanal difabel?

N: Kalau yang untuk tetapnya, jurnalis tetapnya itu saya aja. Tapi kalau untuk kontributor banyak. Jadi Tempo itu kan punya kontributor di daerah banyak. Jadi yang gak tetap itu ada Pito Agustin di Yogyakarta, terus Didit Hariyadi di Makassar yang udah beberapa kali nulis ya untuk kanal difabel. Kayaknya baru 3 itu deh. Mungkin beberapa ada juga tapi kayaknya sumbangsihan. Kayak drug waktu itu ada acara BKKBN kalau nggak salah itu berlintasan itu dengan difabel, ditulis juga. Sumbanganya ke kanal difabel gitu. Kalau kami sih nggak terbatas pada pagar itu ya. Kalau untuk jurnalis kaminya ya saya. Jadi gini, sebenarnya di Tempo itu ada beberapa jenjang jabatan. Tapi waktu itu emang ada kekurangan sumber daya ya. Jadi akhirnya dobel dobel. Kayak mbak rini gitu kan sempat udah redpel kan dia, editingnya itu udah editing akhir. Kan kalau di Tempo layer ya editingnya, berlapis. Jadi itu udah lapis berapa gitu. Di tengah-tengah itu saya, di bawah reporter. Harusnya gitu. Tapi karena nggak ada orang, jadinya kayak turun satu jabatan gitu. Siapa yang bisa ngedit ya ngedit. Gitu aja. Karena yang penting nanti orientasinya pada output sih, pada produk, menurutku.

P: Kalau di Tempo itu ngeditnya berapa layer sih mbak?

N: Kalau dulu ya dari jaman yang saya tahu, ketika saya di lapangan itu ada reporter di lapangan ya kan. Berarti masuk ke keranjang mentah. Dari keranjang mentah itu ada staf redaksinya lagi yang mengedit itu. Supervisor lah gitu. Nah dari supervisor itu ada redpel. Redpel ada RE. RE terakhir bahasa. Jadi ada 5 layer kalau nggak salah. Kadang tu suka agak lama ya kalau koordinasinya lama. Tapi kalau koordinasinya cepet kayak berita hardnews yang kejar-kejaran gitu ya lumayan.

P: Oh saya pikir editing berlapis hanya Majalah Tempo

N: Enggak, semua produk. Dulu kan namanya Tempo Interaktif ya baru diganti jadi Tempo.co tu 2013 atau 2012 gitu saya lupa. Jadi dari Tempo Interaktif, Koran,

sekarang koran nggak ada ya dikemas jadi digital, semua begitu harus melalui itu. Kayaknya itu sudah SOP

P: Berarti redaktur di kanal difabel sendiri gak ada ya mbak, itu semua gabungan dari Gaya Hidup?

N: Ya. Mbak Rini Kustiani itu lah.

P: Kalau mbak Istiqomatul Hayati itu?

N: Itu seleb.

P: Mengapa Tempo.co memiliki kanal khusus untuk isu disabilitas?

N: Mungkin ya kalau dari persepsi saya pribadi ya memang isu ini penting kan sebagai bentuk kesadaran. Kan fungsi dari jurnalistik sendiri ada informasi dan edukasi kan. Itu ada di UU Pers. Jadi salah satunya itu untuk fungsi edukasi bagi masyarakat. Terus yang kedua, kebetulan di Tempo baru pertama kali nih ada wartawan yang menyandang disabilitas. Karena seingat saya dulu saya buta tahun 2016. Terus nggak langsung diterjunin ke liputan lagi. Tapi saya dikalibrasi dulu di citizen journalism namanya Indonesiana. Nah Indonesiana itu di bawah pengampunya mbak Istiqomatul Hayati. Itu 2017 sampai awal 2018. Tapi kemudian di tahun 2018 yang sekarang redaktur majalah, pimrednya mas Wahyu Komang Djatmika itu bilang ke saya, nanya, waktu itu saya banyak nulis di Indonesiana tapi berupa opini ya. Terus dia bilang, menurut kamu perlu nggak kita punya kanal khusus untuk isu disabilitas. Terus saya bilang, oh iya perlu banget bli soalnya ini satu, udah ada UU nya, jadi kalau kita menulis berita itu kita punya patokan, apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Terus yang kedua, isu ini emang lagi hype, istilahnya ini sudah banyak digaungkan tetapi ini nggak pernah punya tempat di mata pers menurut aku ya. Karena dianggapnya kelompok ini marginal, dan inferior. Jadi isunya dianggap nggak penting. Karena begini, ketika isu disabilitas dihadapkan pada ini. Dulu kan isu disabilitas masuknya kesra ya itu, diampunya di desk kesra, kesejahteraan rakyat. Tetapi ketika nanti itu kesra muncul, kemiskinan, perempuan, isu ini pasti mental. Dia gak akan masuk di spacenya media yang sedikit. Jadi menurut saya ini mengiris 3 desk sekaligus, kesehatan olahraga kesra.

Isu ini pasti masuk ke isu kesehatan. Dan nanti kalau ada yang menarik lagi pasti isu disabilitas mental. Jadi menurut saya ini penting kalau memang dibuat kanal tersendiri. Walaupun pada perkembangannya saya baru sadar isu ini ternyata memang lintas sektor, lintas kanal. Hampir ada di semua kanal itu hampir ada isu ini. Jadi menurut saya daripada dia mental, dan gak diperhatikan oleh masyarakat atau pembaca, kenapa gak dibuat kanal khusus, sendiri gitu. Itu sejarahnya dulu.

Jadi 2018 itu Bli Komang akhirnya bilang pada saya yaudah sekarang kamu buat presentasi isu apa aja yang perlu kira-kira kita gali untuk kanal ini. Terus kalau ada sub kanal apa aja. Nah waktu presentasi itu di depan pejabat rubrik itu ada sekitar 7 sub kanal yang saya ajukan. Ada UU, hukum, aksesibilitas, rehabilitasi, inklusivitas, dan sebagainya. Lalu akhirnya dari 7 itu dipotong lah 4. Jadi sub kanal itu kita cuma ada 3 supaya konsen ke disabilitas yaitu rehabilitasi, eh sori, pertama itu aksesibilitas, kedua inklusivitas, ketiga rehabilitasi. Aksesibilitas sudah tahu lah ya ada di UU disabilitas, segala macam fasilitas, infrastruktur yang membuka akses kepada disabilitas untuk mengakses sesuatu. Terus yang kedua ada inklusivitas. Nah di inklusivitas ini saya mencoba menggabungkan isu-isu disabilitas yang kemudian populer di masyarakat umum. Jadi penyandang disabilitas itu bukan saja sebagai objek berita, tapi juga subyek. Nah nanti dibenturkan dengan opini atau kepentingan orang-orang non difabel. Jadi ibarat kata penyandang disabilitas terjun ke dunia non disabilitas, non disabilitas terjun ke dunia disabilitas. Terus yang ketiga, rehabilitasi. Rehabilitasi ini penting karena penyandang disabilitas itu kan nggak selamanya dari lahir ya. Ada yang sudah dewasa, pertengahan, anak-anak, ini ada yang menyangkut kaitannya dengan penyakit atau fisik. Jadi saya mencoba mengakomodasi di sini yang namanya *social model* dan *medical model*. Nah di rehabilitasi ini *medical model* yang banyak dihindari oleh teman-teman penyandang disabilitas, justru saya coba masukan lagi bareng. Jadi mungkin yang aksesibilitas, dan inklusivitas itu *social model*. Nah untuk *medical model*nya itu ada di rehabilitasi. Itu semacam kayak penyebab penyakit, terus bagaimana kalau sudah menjadi penyandang disabilitas, apa yang harus dilakukan, apa tindakan medis yang harus diambil untuk mencegah keparahan dan kerusakan organ lain. Nah ini beririsan dengan isu kesehatan lagi.

Jadi kalau bisa ada isu penting, supaya tidak ditinggalkan, dan tetap dibaca pembaca, membuka cakrawala, dan menambah info, itu semua aksesnya bisa kita akomodasi di Tempo.

P: Apakah Tempo.co sebagai media arus utama memiliki perbedaan dengan media komunitas yang sama sama konsen pada isu disabilitas, seperti Solider?

N: Kalau perbedaanya tentu ya karena kita mainstream, dia engga. Jadi itu beda. Bedanya kita ada kanal lain yang nggak melulu konsen pada isu disabilitas, ada olahraga, otomotif, nasional, politik, dan sebagainya. Jadi batas-batas isunya itu jelas. Sementara media komunitas seperti Solider itu kepentingan yang dibawa adalah kepentingan penyandang disabilitas kan. Nah sementara ini saya mencoba untuk menggunakan instrument difabel.tempo.co itu juga untuk membuka kesadaran dari teman-teman non disabilitas. Makannya banyak berita di difabel.tempo.co itu yang melibatkan subyek beritanya ya, teman-teman non difabel. Sementara kalau Solider kan udah ininya ya, sudah tracknya di situ. Mengkhususkan diri. Jadi dia gak repot sama berita seleb, dan sebagainya. Sementara kita mencoba untuk mengakomodasi seleb harus kejar-kejaran dengan berita seleb. Korupsi tetap harus ada sendiri. Jadi di kita mungkin batasnya jelas. Saya nggak bakal ambil isu korupsi kalau nggak ada kaitannya dengan penyandang disabilitas, atau yang cuma sangkut sangkutin, cuma jadi newspack. Saya agak berhati hati di situ. Sementara kalau Solider mungkin bisa malahan kan. Karena kalau saya ada ketentuan tadi itu, ada SOPnya. Kayak layernya banyak, terus garis batasnya jelas per desk. Itu yang membedakan dengan media internal. Dan gak membawa suatu kepentingan institusi atau lembaga ya kan. Kalau media internal kan mungkin dia membawa kepentingan SIGAB kan bisa. Apa pun kegiatan SIGAB diberitakan, misalnya. Media internalnya SIGAB kan. Nah kita kan engga. Bukan milik satu lembaga atau perorangan. Tempo itu kan gak ada pemilik saham mayoritas, minoritas gitu gak ada. Jadi ya sampai sekarang alhamdulillah independen ya itu. Nggak ada kepentingan utama yang di situ yang harus diberitakan. Walaupun kata orang-orang Tempo tetap berpihak ya. Kan kalau berpihak itu subyektif kan.

P: Nah kalau selain Tempo.co itu ada tidak media arus utama lain yang membuka kanal khusus untuk isu disabilitas?

N: Kalau Kompas.com itu ada kesra ya. Tapi dia masih bercampur sama isu kemiskinan, gender, children, and apa gitu, LGBTQ gitu gitu ya. Nah makanya saya bilang dia kesra, kesejahteraan rakyat. Jadi isunya gak melulu disable tapi kaitannya dengan kesra itu Kompas ada. Kalau saya pantau lagi kayaknya Liputan6.com ada ya. Tapi waktu itu saya kurang begitu jeli deh. Maksudnya secara visual tu dia kanal sendiri atau bagian. Bagian kalau kayak kita mau akses, kalau di pendengaran kan tulisannya cuma disabilitas gitu doang terus isinya. Saya nggak ngerti deh ya kalau dikaji lebih itu masuk sub kanal atau kanal itu. Sama itu, The ITV ya. Itu kayaknya emang dia konsen di situ, tapi kan dia membawa kepentingan budas suci (?) itu juga. Tapi dia digital tv gitu, jurnalis video.

P: Bagaimana proses produksi berita yang mbak lakukan?

N: Alhamdulillah sampai sekarang proses produksinya gak ada yang berubah dari jaman saya masih melihat saya. Kecuali satu, mobilitas. Jadi dulu kemana mana saya liputan saya sendiri. Kalau saya sekarang punya pendamping. Jadi untuk nuntun, untuk bantu liatin narasumber, untuk jadi saksi kalau nanti saya terbentur kasus hukum, membantu mengkonfirmasi orang yang saya wawancara itu bener atau engga, jadi gak berdasarkan suara aja. Nah proses produksinya sama kayak wartawan lainnya, ada proses riset yang pertama, terus wawancara, terus riset lagi, nah kemudian dirangkum, diliat saripatinya, following up isu, terus balik lagi kebelakang, checking yang terbaru apa, kebaharuan kan harus ada, newspacknya apa, nulis, terus upload. Uploadnya ke keranjang berita Tempo. Baru nanti diambil sama editor, editor ngecek lagi semua, baru deh muncul. Itu, jadi sama kayak wartawan lain. Bedanya saya ada pendamping, apalagi kalau wawancara langsung ya, tatap muka face to face. Nah tapi kalau untuk zoom kayak begini biasanya saya sendiri. Saya cuma sedia alat perekam aja dari handphone. Kemudian bermodalkan ketikan cepet gitu. Dari gitu kan kalau di zoom ada pembicara ini Teresia Bela gitu, nanti disebutin kan sama moderator, nah di situ saya ketik. Dari situ saya menguji itu narasumbernya bukan, dari suaranya kan bisa dibedakan.

P: Itu pendampingnya dari Tempo atau mbak sendiri yang bawa?

N: Tempo menugaskan saya untuk membawa siapa aja. Mereka menyediakan reachable accommodationnya. Jadi misalkan ongkos dibayar. Nanti modelnya reimbursement.

P: Bagaimana cara mbak menentukan narasumber?

N: Tentu riset dan validasi ya. Itu penting. Kayak misalkan nih saya mau nulis tentang obat alternatif yang bisa menyembuhkan covid-19. Ini misalnya ya, jangan digabung ke difabel dulu. Gak mungkin saya mewawancarai tukang jamu. Gak mungkin saya mewawancarai tukang obat herbal. Tapi yang saya wawancarai dulu adalah Dirjen Obat Alternatif di Kemenkes, itu dulu. Karena dia dokter dan punya latar belakang ilmunya secara medis. Dan dia harus bisa menjelaskan secara metode ilmiah dan akademis. Kemudian ada data, ada hasil, ada angka. Itu perlu kita validasi. Kayak misalnya kalau berdasarkan kewenangan, misalnya untuk Jiwa Sehat. Saya ke mbak Yenny karena dia ketuanya kan. Dia juga bipolar, penyandang disabilitasnya. Terus dia ngomongin soal panti rehabilitasi sosial, wawancara ke Direktur Rehabsos walaupun gak mesti ada dalam satu frame yang sama ya. Pokoknya yang penting yang pertama riset, terus validasi.

P: Kalau aku lihat di berita yang mbak tulis atau wartawan lain hanya menampilkan 1 narasumber, itu bagaimana sih mbak?

N: karena gini, yang Teresia kaji kan media online ya, cara kerjanya sedikit berbeda dengan media tulis, kertas, kayak koran, majalah. Itu kan 1 frame berita harus satu di situ kan. Cover bothnya. Karena cuma itu doang. Tapi kalau di online itu, mungkin Teresia bisa pantau-pantau lagi seolah-olah itu satu sisi. Padahal engga. Nanti ada following up isu berikutnya yang menampilkan statement dari pihak sebaliknya. Jadi gak cuma satu sisi. Sebenarnya banyak. Kadang nih 1 ada dari BPS. Besok ada dari Kantor Staf Presiden. Kantor Staf Presiden kan mewakili presiden kan. Terus nanti ada Satgas covidnya, nanti ada ahlinya. Tapi itu nanti dengan frame yang berbeda, dengan judul yang berbeda. Tapi itu bentuk cover both sidenya. Itu cara online bekerja memang, Teresia. Karena kalau nggak gitu kita

ketinggalan. Karena running berubahnya kan per menit, gak kayak majalah. Majalah kan seminggu sekali, koran sehari sekali. Itu cara kerja online. Besok deh kalau sudah terjun di media pasti itu deh. Karena gini, kita di online mesti kejar-kejaran dan membutuhkan unsur kebaruan. Makannya kenapa anak-anak majalah itu kalau cari isu suka diem-diem atau sendiri-sendiri. Karena mereka gak mau isunya di blow up sama anak-anak online, walaupun masih satu perusahaan. Misalnya nih saya Tempo.co, yang majalah punya isu lebih oke gitu, itu mereka gak bakalan mau kasih tahu saya. Karena nanti bobol, itungannya kan gitu. Makannya online kan kalau majalahnya juga naikin, haduh kita bobol juga nih. Gimana nih. Paling dicicil satu satu. Kadang di satu perusahaan aja gitu, Teresia. Kalau di profesional ya, maksudnya yang media mainstream gitu.

P: Ternyata saingan juga ya mbak di dalam

N: Iya. Karena kalau orientasinya kan bisnis kan. Bukan ngebawa kepentingan internal. Jadi harus gitu. Bahkan kita harus lihat lapak sebelah, misal Detik.com, atau Okezone, Kompas.com, CNN, IDN Times, banyak deh sekarang. Bahkan ada NewsDifabel buatannya anak-anak difabel. Tapi itu tadi tetap harus melalui training jurnalistik yang lebih mumpuni lah. Karena kemarin yang saya baca dia bikin berita deklarasi bahwa obat verbal ini dapat menggantikan vaksin covid-19. Itu bahaya tu. Itu gak dikalibrasi kan. Yang ngomong tukang jamu herbal di Bandung. Makannya mereka perlu pelatihan jurnalistik. Terus Pertuni mana menerima bantuan mobil terus diberitakan. Itu kan gak ada nilai beritanya ya. Nah yang gitu gitu perlu dikalibrasi, validasi. Nah temen-temen tu ada yang belum tahu. Nanti lihat sendiri NewsDifabel. Itu lumayan produktif nulisnya, bibit yang baik kan sebetulnya untuk sebuah berita difabel, untuk pengarus utamaan berita difabel. Cuma itu tadi dari kaidah jurnalistiknya kayaknya mereka perlu latihan lagi.

P: Bagaimana mbak memandang difabel di masa pandemi covid-19 ini? Apa saja hambatan yang dialami?

N: Ya kalau difabel kalau penuh hambatan itu kayak sudah qitoh ya, sudah suratan takdir. Bahkan sebelum covid-19 saja mereka itu udah banyak hambatannya kan.

Soal aksesibilitas. Itu kalau gak diperhatikan aksesnya yaudah rentan banget. Ditambah lagi ada pandemi. Rentannya dua kali lipat. Kenapa saya bilang golongan vulnerable. Di kondisi biasa aja mereka udah banyak halangan. Ditambah lagi kondisi pandemi. Contoh, seperti saya orang buta atau penyandang disabilitas sensorik netra. Istilah resmi dari UUnya ya. Orang buta itu kalau jalan gak mungkin gak raba-raba ya kan. Hebat bener ya kan kecuali low vision. Gak ngeraba ngeraba, dituntun gitu. Padahal di protokol kesehatan selama pandemi kalau bisa jangan menyentuh barang-barang kan. Gimana cara naik mobil orang buta? Padahal kita harus cari kerja. Terus ketika temen-temen yang berprofesi sebagai pemijat. Itu kan harus menyentuh orangnya. Gak mungkin harus *social distancing*, jaga jarak gak mungkin. Pemijat yang dipijat jaraknya 2 meter gak mungkin. Terus akses ya, teman-teman kursi roda. Ini kalau misal ke supermarket baru dateng ada yang nuntunin kursinya, ada yang nunjukkin jalannya ya kan. Ternyata sekarang kan gak boleh bersentuhan. Mereka mau belanja gimana kalau gak ada yang nuntunin kursi rodanya ke atas, atau nunjukin ya gak. Keluar dari apartemennya yang bertingkat aja udah gak mungkin. Padahal mereka harus makan. Kalau gak online ya gimana. Banyak lah yang gitu-gitu. Terus yang disabilitas sensorik rungu atau tuli. Tuli itu kemana-mana kan baca gerak bibir, begitu pada pake masker mereka mau akses informasi apa. itu semakin vulnerable selama kondisi pandemi kayak gini. Jadi bukan masalah uang atau ekonominya, mungkin bagi sebagian disabilitas gak selamanya gak punya duit. Tapi cara mereka mengakses sesuatu jadi susah, misal mau cek kesehatan, ke rumah sakit susah. Kan yang kena covid gak cuma orang yang non disabilitas kan. Orang disabilitas ada yang kena covid. Tuna netra meninggal saking gak tau gimana caranya, terus gak tau tesnya, gak tau ke rumah sakitnya. Karena mungkin informasinya terbatas dari dia. Alhamdulillah tuna netra yang kayak saya. Masih bisa akses ke internet, masih mendingan gitu kan. Tapi coba yang sudah tua, yang disabilitas, yang biasanya tatap muka atau offline. Itu banyak jumlahnya. Gimana rasio perbandingannya? Yang lahir sama yang meninggal banyak yang lahir kan. Makannya Indonesia dapet bonus demografi. Yang tua juga banyak. Sementara yang tua ini takut. Tahapnya sebelum meninggal biasanya tuli dulu, jadi buta dulu, stroke dulu, itu jumlahnya banyak. Dan

generasinya yang tidak tersentuh internet dan barang-barang digital. Coba bayangin. Kalau mereka harus hidup sendiri atau hidup di tengah masyarakat yang gak mengenal internet. Itu kondisinya gak vulnerable lagi, ibarat telur udah di ujung tanduk. Apalagi di tengah masyarakat yang gak sadar. Nah saya gak tahu apakah tanggung jawab pemerintah sampai situ. Disabilitas, lansia, vulnerable, nah itu dia.

P: Menurut mbak, bagaimana pemerintah menangani difabel selama pandemi covid-19?

N: wawa

P: Menurut mbak dari awal Maret sampai kini belum ada perubahan pada penanganan pemerintah terhadap difabel?

N: Kalau menurut saya nggak ada. Karena gini, kalau ditanya produk atau outputnya ada gak? Ada protokol kesehatan untuk disable. Waktu itu sempat Pertuni ngeluarin. Dertatin (?) ngeluarin. Terus PPDI sempet ngeluarin. Tapi saya gak tahu itu sebatas protokol aja, sosialisasinya belum tentu. Yang di daerah-daerah itu seperti kebutuhan masker saja saya yakin pada belum tahu. Kayak misalnya nih, akses keluar untuk menghantarkan kebutuhan-kebutuhan pokok seperti makan, karena mereka gak bisa keluar. Terus pendidikan, untuk anak difabel dan non difabel selama pandemi ini beda jauh. Kalau anak difabel ini kan membutuhkan konsultasi dan terapi ya. Misalkan untuk yang anak tuli kan ada pelatihan bicara, kayak ada video, tapi itu gak mungkin dilakukan secara daring. Atau anak-anak yang mohon maaf tuna grahita, disabilitas intelektual. Itu gak mungkin gurunya gak ada di sampingnya. Dan gak semua orang tua tahu cara ngajarin anak dengan kebutuhan khusus, kayak autis. Itu kan perlu ada konseling bulanan yang harus dilakuin. Apa itu namanya, terapi konsultasi ya. Nah itu harus ada. Di daring, selama PSBB itu gak memungkinkan. Pemerintah gak mikirin sampai situ. Tahu-tahu sudah nerapin aja pembelajaran jarak jauh. Terus anak-anak yang berkebutuhan khusus ini gak tahu gimana. Mereka struggle banget, cerita-ceritanya banyak. Ada yang ibu bapaknya tertekan jiwanya karena gak terbiasa melatih anaknya, gak tahu apa yang dibutuhin. Ada yang sampai dimarahin.

Kekerasan meningkat, anak jadi sasaran pemukulan. Dan itu menurut saya pemerintah belum ngambil peran, apa yang harus dilakukan.

Panduan protokol kesehatan gak dijelaskan secara spesifik kebutuhannya. Kayak misalnya ni saya yang buta, beda dengan yang tuli kebutuhannya. Yang tuli beda dengan yang kursi roda. Yang kursi roda beda kebutuhannya dengan yang mental psiko sosial. Mental psiko sosial beda kebutuhannya dengan yang difabel intelektual. Semua itu beda-beda. Nah sementara yang kemarin itu yang dikeluarkan oleh Satgas Covid adalah protokol kesehatan secara universal untuk difabel. Saya gak ngerti deh itu dalemnya kayak gimana.

P: Kalau panduan kelas inklusi selama pandemi?

N: Kalau kaitannya dengan pandemi belum ada. Tapi sebetulnya di kementerian pendidikan itu ada dirjennya, dirjen pendidikan khusus apa ya saya lupa. Mereka itu sudah punya Permen terkait pendidikan inklusi, syarat penyelenggaraan pendidikan inklusi sendiri, peraturan tentang akomodasi yang layak pun sudah dikeluarkan dengan presiden. Tapi yang kaitannya gak ada sama sekali dengan pandemi. Bisa kan ya bedainnya. Jadi kalau ditanya pengaturan tentang inklusi, pengaturan tentang pelajaran buat anak berkebutuhan khusus, itu di kemendikbud itu lengkap. Pemerintah lengkap. KemenPPA lengkap. Kementerian Sosial apa lagi. Presiden sudah ngeluarin 6 peraturan teknis dari 8 peraturan perundang-undangan tentang penyandang disabilitas. Kurang lengkap apa ya kan. Tapi yang kaitannya dengan pandemi, ini kan okasional Jadi gak selamanya terjadi ya, terjadi secara temporer kan, ini gak ada aturan khususnya yang dikeluarin. Pedomannya gimana itu gak ada. Beberapa guru itu mengeluh ke saya. Kami yang punya murid-murid disabilitas multi, misalkan tuna netra sama intelektual kayak udah autis terus buta, kami gak bisa mbak melakukan pembelajaran jarak jauh melalui media daring kayak gini. Karena anaknya pasti gak bisa diem, gak bisa lihat, ngomongnya kemana-mana. Wong komunikasinya aja terbatas.

P: Memang belum ada solusi ya mbak?

N: Betul. Belum ada.

P: Mengapa pemberitaan struktural itu lebih banyak ditampilkan oleh Tempo daripada berita tentang, misalkan difabel yang membuat masker dan APD untuk dibagi-bagikan?

N: Karena ini kan permasalahan lintas sektor ya. Gak melulu ini masalah kemensos, atau organisasi penyandang disabilitas. Ini tanggung jawab semua orang, menurut saya. Ini maaf ya off the track dulu misalnya. Saya coba menjelaskan soal social model dan medical model. Kalau social model, yang jaman sekarang tuh negara-negara di dunia sudah memandang difabel dengan social model perspektifnya. Jadi orang bisa disabilitas bukan karena salah Tuhan dia begitu. Bukan karena dia gak punya tangan, gak punya mata, dia jadi begitu. Dia jadi disable karena umum dia memiliki kaidah keumumannya sendiri tanpa bisa menerima variety atau keberagaman. Jadi orang punya mata ni tapi gak bisa melihat itu disebut disabilitas, orang kakinya satu itu disebut disabilitas, orang tangannya satu itu disebut disabilitas, orang gak bisa jalan itu disabilitas, cara dia mengakses sesuatu itu jadi disable ya kan. Karena akses itu dalam format orang awam. Orang yang matanya dua, kakinya berfungsi, tangannya berfungsi gitu. Tapi kalau misalnya ni di dunia ini dibuat gelap. Orang yang punya mata jadi gak bisa lihat kan. Tapi orang buta tetap bisa jalan karena dia biasa begitu. Sekarang kalau diubah begitu gimana. Nah social model dilihatnya seperti itu. Yang membuat penyandang disabilitas gak berfungsi dengan baik di masyarakat karena mereka harus mengakses segala sesuatu dalam format orang indi (?) Kaidah keumuman orang yang sekarang. Itu yang membuat mereka disabilitas. Tetapi kalau medical model yang itu tadi yang lama modelnya. Kamu sakit ya kamu cacat. Jadi kamu dianggap gak bisa apa-apa. Artinya kamu produk returnnya Tuhan. Padahal Tuhan menciptakan semua makhluk hidup tanpa cela ya. Kita semua sepakat. Di semua agama, semua yang diciptakan Tuhan itu sempurna. Makannya saya bilang tadi kenapa saya menulis berita-berita yang menurut Teresia itu struktural karena ini harus mengubah perspektif. Kenapa saya menulis permasalahan struktural lebih banyak karena itu yang dibutuhkan. Penyadaran bahwa oh iya bahwa cara kamu mengakses sesuatu jangan pakai cara kamu doang. Contoh sederhananya, kalau kita naik ke ruang yang lebih tinggi pakai tanda berundak kan, padahal tanda berundak itu gak bisa dipakai pada orang yang

kakinya gak ada. Tapi kalau akses ke tangga yang lebih tinggi itu pakai ram yang jalannya miring, saya rasa gak cuma pengguna kursi roda yang bisa kan, orang yang punya kaki juga bisa kan. Nah itu social model. Nah yang menyediakan itu harus dilaksanakan secara struktural kesadarannya. Pemerintah, aparat, tetangga kalau perlu, saudara. Semua harus disadarkan. Bahwa cara kamu mengakses gak semua bener. Jadi ada istilah universal design kan. Universal design itu design untuk semua. Jadi gak cuma orang biasa yang bisa akses, tapi orang disabilitas, orang hamil, orang tua. Contoh lagi ya, coba kalau tangga-tangga itu diganti jadi ram. Orang cacat bisa naik, orang biasa bisa naik, orang tua bisa naik, orang hamil bisa naik. Nah yang kayak gitu tanggung jawabnya gak mungkin ... harus kita kejar terus. Harus di follow up supaya sadar.

Sementara kalau memberitakan kreativitas teman-teman difabel jatuhnya hyper heroism. Seperti misalnya orang biasa nih bisa bikin masker, terus ada orang difabel bisa bikin masker. Itu nanti bisa lebih bernilai, heboh beritanya yang difabel yang bikin masker. Padahal sama-sama buat masker gitu. Mendewakan penyandang disabilitas dari keadaan sebenarnya. Jadi gini kayak misal ada kata-kata di artikel meskipun, ada kata “meskipun” si Cheta buta Cheta bisa naik busway dan pergi ke kantor. Itu hyper heroism padahal gak mesti orang buta. Orang biasa bisa, orang hamil bisa naik busway. Tapi nilai artikel seolah-olah bisa booming karena buta yang naik. Itu hyper heroism. Nah kalau kita terlalu banyak buat artikel itu nilai berita, informasinya apa selain rasa kasihan dari pembaca. Pembaca cuma kagum doang tapi gak tahu apa yang dibutuhkan kan. Dia gak tahu betapa kita strugglenya saat desak-desakan, ngraba-ngraba, gremeng-gremeng, kalau gak ada guiding block. Gimana kita mentok, nyasar, kan gak tahu. Tahunya cuma prestasi bisa naik busway.

Saya mau tetap memberitakan prestasi tentang difabel yang spesifik ya, yang belum tentu orang biasa bisa ngelakuin. Misalnya pemain kursi roda main tenis. Orang dengan anggota tubuh lengkap aja susah main tenis kan. Tapi ketika tenis dengan kursi roda, yang satu pegang raket yang satu megang kursi roda, coba bayangin.

Nah itu kemampuannya berbeda ya kan. Bukan cuma saya yang naik busway gitu. Saya mau memberitakan prestasi yang seperti itu.

Sebenarnya kalau yang buat masker itu lebih ke inisiatif ya bahwa difabel membuat itu. Saya mau lihat di situnya. Bukan mentang-mentang difabel terus buat masker “nih jadi produknya”. Jangan. Saya sebagai difabel aja miris lihat gitu. Otomatis ya, subyektif.

P: Seperti menampilkan UU di dalam berita

N: Iya itu rising awareness ya untuk meningkatkan kesadaran publik soal akses yang setara. Setara itu bukan berarti sama ya. Makannya banyak tu dasar hukumnya yang sering saya masukin ke dalam artikel biar orang tahu dan gak asal ngomong.

P: Memasukkan landasan hukum dalam berita itu termasuk solusi bukan?

N: Iya. Menurut saya salah satu cara mengingatkan ya minimal. Setidaknya ketika kita bicara soal itu dan mereka baca, mereka tahu bahwa oh ya selama ini saya belum memenuhi standar hukum, atau saya menyalahi aturan hukum. Kayak misalkan pemasangan. Kan selama ini di panti rehabilitasi sosial orang gila, orang dengan gangguan jiwa. Padahal kan difabel psiko sosial kan. Mereka gak perlu dipasung karena pemasangan itu udah gak boleh sama konvensi HAM. Kita udah ratifikasi konvensi HAM. Kita masih melakukan pemasangan berarti pelanggaran hukum kan. Bisa ditindak harusnya kan. Itu kalo gak disadari pake peraturan mereka terus masung. Tahunya mereka orang gila, pasung aja biar gak ngamuk. Padahal itu menyalahkan HAM. Gak boleh. Bahkan terhadap penyandang disabilitas. Bisa diganti sebenarnya pemasangan itu dengan ruang senyap. Atau istilahnya ruang relaksasi. Dirantai juga masih banyak. (lanjut ngomongin guguk heuheu)

P: Mengapa mbak menampilkan survei JDI dalam berita? Bagaimana menentukan bahwa survei tersebut layak dan valid ditampilkan?

N: Mungkin saya ceritakan latar belakangnya dulu ya kenapa saya mengutip survei itu. Permasalahan pertama sampai sekarang itu data penyandang disabilitas di

Indonesia belum ada yang valid. Kecuali dari susenas atau supas BPS tahun 2017 atau 2019 saya lupa. Yang jumlahnya 30 juta. Tapi itu engga menyebutkan spesifikasi apakah itu laki-laki, perempuan, disabilitas apa ragam disabilitasnya itu gak ada. Itu satu. Jadi ketersediaan data itu gak ada. Terus kemudian ada nih jaringan organisasi penyandang disabilitas yang berinisiatif melakukan survei di kalangan mereka. Artinya kan mereka pakai sampel ya. Jadi memang gak menjangkau semua seluruh Indonesia, karena mungkin keterbatasan dana dan kemampuan juga. Tapi mereka berhasil memetakan penyandang disabilitas berdasarkan ragamnya. Jadi di survei itu ada laki-lakinya, ada perempuannya, terus ada penyandang disabilitas sensorik netra, sensorik tuli, sensorik netra tuli, itu lengkap. Jadi ini semacam memberikan landscape yang keadaan sebenarnya nih difabel seperti apa, menurut saya. Karena itu tuh yang saya kutip “81 persen” adalah bagian dari survei mereka. Sebenarnya mereka ngeluarin banyak versi, ada berapa gitu. Maksudnya kategori-kategorinya. Gak cuma dampak ekonomi, tapi pekerjaan, jumlah dan sebagainya, terus ketersediaan informasi, kayak gitu gitu itu ada. Cuma menurut saya angka ini cukup besar dan penting jadi saya naikan ke berita. Nah itu latar belakangnya.

Kalau ditanya itu reliable gak, itu reliable. Karena mereka menggunakan metode ilmiah. Penelitian, pengambilan datanya juga menggunakan metode statistik yang baik. Terus mereka menyebarkan surveinya juga secara digital dan itu langsung masuk ke orangnya. Saya termasuk orang yang mengisi survei itu ya. Jadi mereka punya pertanyaan yang lengkap dan punya model pertanyaan yang sudah teruji. Salah satunya menggunakan metode Washington Group. Saya kurang begitu tahu ya tapi nanti bisa dilihat di google. Ada penelitian untuk disabilitas itu rekomendasi WHO, kalau gak salah namanya Washington Group. Mereka pakai itu. Kan selama ini liding/riding? untuk penyediaan data disabilitas itu kalau gak di Kemensos, di Kemendagri kan, jadi dua itu. Kemendagri ini dibawah Dirjen Dukcapil, jadi harus ada harmonisasi antara data kemensos dan data kemendagri. Itu sampai sekarang bertahun tahun gak ada. Kemensos itu ada dtks namanya. Kemendagri pakai administrasi kependudukan dan catatan sipil. Nah ini harus diharmonisasi. Tapi sampai sekarang itu gak ada kabarnya. Nah baru tiba-tiba ada nih jaringan difabel

nusantara, mereka berinisiatif membuat survei sendiri. Dan mereka reliable gitu lho, bisa diterima karena ilmiah. Terus lengkap, fotonya lengkap, menyediakan disabilitas dengan berbagai macam ragam, bisa memberikan landscape yang tepat gitu. Jadi makannya saya kutip. Soalnya gak ada lagi lembaga yang berinisiatif bikin data gitu.

Coba dibayangkan deh. Pasti kayak gitu kan membuang banyak uang, energi. Tapi mereka mau berinisiatif buat. Dan mereka sendiri yang tahu keadaan mereka kan. Makannya difabel itu kan semboyannya “gak ada kita tanpa kita”. Karena memang orang-orang di luar sana itu gak tahu sebenarnya kebutuhan apa saja, pemetaan apa saja. Karena yang dilihat selama ini dari kasat mata baik-baik saja. kayaknya itu gak penting, itu gak penting. Karena gak ada di posisi penyandang disabilitas. Ini yang membuat disabilitas sendiri, pakai dana mereka sendiri, energi mereka sendiri, dan inisiatif mereka sendiri. dan mereka bisa memberikan landscape yang tepat. makannya saya kutip. Mungkin kalau kemensos atau kemendagri ngeluarin data, saya kutip juga.

P: Menurut mbak, berita yang tepat untuk menggambarkan difabel di masa pandemi covid seperti apa? atau secara umum itu seharusnya bagaimana?

N: Pertama, tentu pada dasarnya sama dengan berita-berita lain. Harus memenuhi kaidah jurnalistik ya. Kedua, yang sering tidak disadari sama insan pers, insan media, ketika memberitakan kelompok-kelompok rentan seperti anak, difabel, LGBTQ, yaitu soal identitas. Atau tadi yang saya bilang hyper heroism. Saya memetakan 4 masalah ya. Nanti saya kasih penelitian saya ke Teresia. Ini media landscape versus perspektif disabilitas. Jadi banyak media yang memandang difabel dengan hyper heroism. Kalau bisa ini dihindari. Terus yang kedua, porno inspirasi. Jadi seseorang itu bersyukur karena keadaan jelek orang lain. Misal, saya buta terus Teresia merasa lebih beruntung menjadi jurnalis karena dia melihat, dibanding saya yang jurnalis tapi biuta. Di saat pandemi covid-19 sebagai orang non tuna netra saya merasa lebih beruntung dibanding yang tidak bisa melihat, misalnya gitu. Atau karena ketunanetraannya kita nih semua harus bersyukur. Terus yang ketiga, miss representasi, representasi yang salah soal penyandang disabilitas. Ini kasus baru

yang saya tulis tentang film The Witches. Yang main Anna Hathaway. Jadi The Witches itu bercerita tentang penyihir jahat. Nah penyihir jahat itu sebenarnya dalam buku aslinya dilambangkan mempunyai tangan dengan kuku panjang, terus kuku kaki panjang, yang matanya tajam berkilat kilat seperti itu, tapi kemudian diterjemahkan oleh movie maker itu tangannya cuma 3, ini kan disabilitas. Namanya bradagtila, disabilitas yang jarinya gak lengkap. Dilambangkan berjari 3 kan disabilitas. Kaki jadi 3 itu disabilitas. Jadi penyihir jahat itu digambarkan penyandang disabilitas. Itu gak boleh kayak gitu. Atau misal ada kasus pembunuhan yang membunuh adalah penyandang disabilitas gangguan psiko sosial. Itu langsung tertuju ke dia. Dia yang membunuh soalnya dia gila. Itu gak boleh. Itu namanya miss representasi. semacam justifikasi juga tapi salah. Terus satu lagi saya lupa. Ada 4. Nanti saya kirimin deh buat Teresia. Kalau bisa jangan menyertakan 4 hal itu. Misal nih, ada ibu-ibu daksa di masa pandemi dikasih makan sama anjing. Ada nih akhir-akhir ini. Itu beredar di grup-grup whatsapp. Jadi disabilitas tangan dan kaki. Jadi video itu dimulai dengan penjual roti yang rotinya dicolong sama seekor anjing. Terus penjual roti itu memukul anjingnya. Jadi kayaknya penjual roti ini susah dagang gak laku-laku. Begitu mau dipukul anjingnya malah mau ngasih roti ke orang cacat. Itu gak boleh kalau kayak gitu. Walau disable tangan dan kaki tapi mereka punya mulut. Gak mungkin dikasih makan sama anjing ya kan. Itu porno inspirasi. Pandanglah disabilitas itu sama.

P: Mbak pernah dapat feedback dari pembaca karena berita yang mbak tulis?

N: Biasanya mereka ada yang menulis di kolom komentar. Tapi saya lupa siapa. Terus ada yang menghubungi nomor telepon saya melalui jaringan wartawan. Misalnya waktu itu ada mbak Dewi. Dia baca berita difabel psiko sosial. Terus dia nanya apa kebutuhan difabel psiko sosial, apa yang bisa dilakukan terhadap difabel di panti sosial. Terus ada, “anak saya tuna netra mbak, mau disekolahkan. Sekolah yang inklusif mana mbak” nanya gitu. Terus ini belajar matematika. Ada nih anak saya mau belajar matematika tapi terhambat karena tuna netra. Staf ahli fraksi PKS dulu juga pernah menghubungi saya. Dia bilang ini, “mbak, matematika untuk tuna netra oke juga ya mbak. Di mana saya bisa saya mengubungi lembaganya”.

Biasanya gitu langsung ke saya. Tapi gak banyak. Dan alhamdulillah semua feedbacknya itu positif. Karena mungkin angle beritanya bukan berita yang konflik ya. Saya lebih mengedepankan prinsip jurnalistik yang informasinya lebih mengedukasi.

2. Tanggal: **12 Januari 2021**

Via: WhatsApp

P: Latar belakang mbak kuliah di Fakultas Hukum berpengaruh pada pekerjaan sebagai jurnalis tidak? Kalau iya, bisa diceritakan pengaruh yang mbak rasakan?

N: Kuliah saya di Fakultas Hukum Unpad tentu berpengaruh juga terhadap pekerjaan saya saat ini. Terutama ketika dulu meliput di desk Nasional, sekitar tahun 2007 sampai 2012. Waktu itu saya kebetulan dapet di desk Hukum dan Nasional posnya sekitar di Sunasaid. Waktu itu saya pegang Kemenkuham, tipikor, KPK. Nah untuk pengetahuan dasar hukum itu penting banget. Kemudian pengetahuan dasar hukum juga berlaku untuk beberapa peraturan sekarang. Banyak yang bisa dikritisi lah dengan latar belakang pengetahuan di bidang hukum.

P: Kanal Difabel Tempo.co selama ini menjalin kerja sama dengan siapa saja, mbak? Bentuk kerja samanya seperti apa?

N: Dulu kayaknya pernah kerja sama waktu awal-awal dibuka dengan Mitra Netra. Itu yayasan yang bergerak di bidang pemberdayaan penyandang disabilitas sensorik netra, di bidang akademis khususnya. Baik untuk yang mengalami ketunanetraan dari kecil atau lahir, atau orang yang mengalami ketunanetraan ketika dewasa. Nah waktu itu Tempo pernah pada saat pembukaan Kanal di 2018 tu sempat ada kerja sama. Bentuknya waktu itu MoU tapi sepertinya kurang begitu berjalan. Karena waktu itu mekanismenya kalau gak salah teman-teman tunanetra itu yang berminat menulis silahkan berkontribusi untuk berita difabel. Tapi gak ada yang ngirim. Gak

ngerti deh kenapa. Apa karena pengumumannya atau sosialisasinya kurang gimana. Karena gini, pada saat MoU itu kebetulan saya lagi di Bali. Waktu itu di Bali untuk persiapan AAS tapi masih di English Language Assistenya. Jadi ketika MoU itu ditandatangani saya posisinya di Bali, gak di Jakarta.

P: Menurut mbak, ideologi Tempo selama ini seperti apa?

N: Menurut saya, sangat ideal ya. Mereka mengutamakan sebenarnya kaum-kaum yang termarginalkan dalam beritanya. Tapi gak semua orang bisa menangkap hal itu. Saya gak ngerti ya, nanti kalau dibilang gini takutnya sok suci. Tapi memang menurut saya mereka banyak membela kaum-kaum termarginalkan tanpa mengabaikan prinsip atau asas cover both side, dan asas-asas jurnalistik lainnya. Jadi ideologinya tu kayak misalnya mereka lebih berat kepada penegakan HAM, penegakan hukum yang seperti itu. Yang pasti lebih berpihak pada publik. Artinya engga mengambil satu opini tertentu yang menguntungkan satu pihak. Bukan. Tempo menurut saya adalah media yang berusaha menapakkan salah satu kakinya di tempat yang relatif benar. Relatif ya karena kebenaran kan sebuah keniscayaan. Jadi kalau ditanya ideologinya Tempo apa, awak medianya sendiri bermacam-macam jenisnya gitu. Gak melulu seperti apa, atau terpolarisasi dengan satu ideologi. Tapi menurut saya yang paling asik kerja di situ adalah saya bebas berpikir, saya gak tertekan ketika menulis, saya gak diatur anglenya, dan yang pasti kalau menurut saya itu benar saya tulis dan itu akan dinaikin. Asal datanya lengkap, faktanya mendukung, kemudian juga wawancaranya mendukung. Jadi kalau ditanya ideologinya apa, di Tempo itu gak terpolarisasi ya menurut saya. Gak tau kalau pandangan opini di luar. Sering kan pada saat ini contohnya buzzer gitu. Misalnya ngomong bahwa ketika kita memberitakan tentang A, mereka menganggap bahwa Tempo adalah media A. Tapi di satu sisi ketika kita memberitakan tentang B, publik menggambarkan seolah-olah bahwa kita adalah pendukung B. Padahal engga. Kalau misalnya pendukung atau ideologi utama kan harusnya A ya A aja ya, B ya B aja maksudnya. Nah karena Tempo menurut saya ideologinya tidak terpolarisasi sama sekali. Jadi itu menurut saya independensinya sih gak diragukan. Gak ada juga kok pemilik modal mayoritas di situ. Gitu.

TRANSKRIP WAWANCARA RINI KUSTIANI

Tanggal: 23 Desember 2020

Via: WhatsApp

P: Background narasumber: jurusan kuliah, bagaimana awal mula tertarik pada bidang jurnalistik, bagaimana perjalanan karir mbak sebelum menjadi editor di Kanal Difabel Tempo.co? Mengapa Tempo.co membuat kanal khusus untuk isu difabel? Apa yang ingin disampaikan?

N: Rini Kustiani. Redaktur Utama TEMPO

Penanggung jawab desk gaya hidup Tempo.co, meliputi kanal:

a. seleb.tempo.co

b. cantik.tempo.co

c. gaya.tempo.co

d. travel.tempo.co

e. difabel.tempo.co

f. cantika.com (situs vertical Tempo.co yang khusus menyoroti gaya hidup perempuan).

Kuliah jurusan Sosiologi Universitas Airlangga. Masuk Tempo 2005. Perjalanan karier mulai dari reporter desk news yang meliput isu hukum, metropolitan, dan ekonomi di Tempo Interaktif (www.tempointeraktif.com sebelum menjadi Tempo.co). Kemudian rotasi ke Koran TEMPO meliput isu pendidikan, hukum, gaya hidup. Lalu rotasi lagi ke Majalah TEMPO mengisi rubrik hukum dan gaya hidup.

Setelah itu saya ke Koran TEMPO lagi untuk mengisi rubrik digital serta ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu ke desk metropolitan, kemudian ke TEMPO.CO. Di Tempo, rotasi adalah keniscayaan.

Singkat cerita, ketika bertugas di TEMPO.CO, aku bertanggung jawab untuk desk gaya hidup. Saat itu Cheta Nilawaty menjadi Staf Redaksi. Cheta membantuku

mengisi konten di kanal cantik.tempo.co. Dalam beberapa hari, aku mendapati Cheta sering keliru memasang foto di artikel, tulisannya juga sering typo.

Kemudian sempat aku tanyakan kenapa bisa seperti itu dan Cheta mengatakan sepertinya ada tak yang beres dengan penglihatannya. Lantas Cheta memeriksakan diri ke dokter dan ternyata dia mengalami gangguan penglihatan. Sejak itu Cheta fokus memulihkan diri dan perusahaan memberikan kelonggaran hingga pengobatan tuntas.

Keberadaan kanal difabel.tempo.co tak lepas dari kondisi Cheta saat itu. Perusahaan berusaha mencari jalan keluar agar Cheta tetap produktif. Sebab apapun kondisinya, kemampuannya sebagai seorang jurnalis tak terbantahkan dan sumber daya manusia yang ada adalah aset.

Pemimpin Redaksi Tempo.co saat itu, Wahyu Dhyatmika kemudian mengajak Cheta bersama komunitas penyandang disabilitas berdiskusi. Kala itu, Tempo.co menggali apa saja isu yang menarik untuk diangkat menjadi berita dan patut diketahui masyarakat. Wahyu Dhyatmika kemudian mencetuskan kanal difabel.tempo.co. Cheta menjadi pionir dan aku membantu dari sisi editing dan penayangan.

Untuk lebih jelasnya, silakan menyaksikan video saat peluncuran kanal difabel.tempo.co. Di situ juga ada pernyataan dari Wahyu Dhyatmika tentang urgensi kanal difabel ini.

<https://video.tempo.co/read/13587/live-streaming-peluncuran-kanal-difabel-tempo>

P: Pembagian tugas jurnalis di Kanal Difabel itu bagaimana? Kalau saya lihat di susunan redaksi, jurnalis yang menulis di kanal difabel (seperti mbak Cheta) masuknya desk Gaya Hidup

N: Kanal difabel.tempo.co menjadi salah satu kanal dari desk Gaya Hidup yang ada di Tempo.co, seperti yang saya jabarkan tadi. Mengenai siapa yang mengisi kanal difabel, sejatinya bebas. Bisa lintas kompartemen, lintas kanal, asalkan isunya sesuai.

Selama ini memang Cheta yang lebih banyak mengisi konten di kanal difabel.tempo.co. Sebagai jurnalis, Cheta mampu mencari dan menakar mana yang sesuai untuk dilaporkan dan mana yang tidak. Jadi, Cheta membuat laporannya, aku mengedit dan menayangkannya.

P: Susunan redaksi di Kanal Difabel bagaimana?

N: Staf Redaksi: Cheta Nilawaty, koresponden Tempo di berbagai daerah, tim gaya hidup Tempo.co, dan reporter Tempo.co

Editor: Rini Kustiani, Mitra Tarigan

P: Apa yang membedakan Tempo.co dengan media online mainstream lain, khususnya terkait pengelolaan isu disabilitas?

N: Tempo.co adalah situs berita pertama yang punya kanal khusus difabel dan yang wartawannya adalah seorang difabel dari ragam disabilitas netra. Perusahaan media lain belum tentu punya keberanian seperti ini. Sebab itu, perspektif dan angle yang kami tulis dalam setiap konten di kanal difabel.tempo.co memiliki perspektif hak asasi manusia, bukan charity atau derma. Banyak rambu dalam penulisan konten difabel, di antaranya tidak boleh mengeksploitasi, baik di judul maupun isi; melihat suatu isu dari sudut pandang difabel; menyampaikan dan menghormati keberagaman dalam penyampaian isu difabel, dan sebagainya.

P: Kalau saya lihat di Kanal Difabel ada pembagian sub kanal, seperti aksesibilitas, inklusivitas, dan rehabilitasi. Pertimbangannya apa membagi ke beberapa sub kanal tersebut? Lalu karakteristik masing-masing sub kanal apa saja?

N: Wahyu Dhyatmika, aku, dan Cheta mendiskusikan apa saja sub-kanal atau rubrikasi dalam kanal difabel. Kemudian Cheta mengusulkan, aksesibilitas, inklusivitas, dan rehabilitasi.

Kanal difabel.tempo.co terbagi menjadi 3 sub kanal:

- a. Aksesibilitas: Bagian ini mengupas isu aksesibilitas bagi difabel. Akses dalam wujud apapun, misalkan fisik, aspirasi, sudut pandang, gagasan, dll.
- b. Inklusivitas: Menyajikan informasi tentang apa yang terjadi pada teman-teman difabel. Bisa berupa pencapaian tertentu/prestasi, profil, kegiatan menarik, dan lainnya.
- c. Rehabilitasi: Rubrik ini mengupas terobosan –baik dalam dunia medis maupun ilmu pengetahuan dan teknologi, tentang apa saja yang dapat membantu difabel dalam beraktivitas atau pemulihan.

P: Proses editing yang mbak lakukan selama ini bagaimana? Apa saja karakteristik berita yang ditulis oleh jurnalis sudah tepat dan layak tayang?

N: Sederhananya, Cheta menyampaikan rencana tulisan hari ini atau besok => aku setuju atau perlu penajaman => Cheta menulis dan memasukkan laporannya ke sistem => aku mengambil dari keranjang berita, mengedit, dan menayangkan.

Karakteristik berita yang layak tayang di kanal difabel.tempo.co sama seperti prinsip news value dan memenuhi unsur 5W1H.

P: Apa saja tantangan yang dihadapi ketika menjadi editor di Kanal Difabel?

N: Tantangannya hanya satu, yakni kekurangan sumber daya manusia. Untuk menyiasatinya, sering kali saya meminta teman-teman koresponden memperhatikan isu difabel yang menarik di sekitarnya.

P: Bagaimana mbak memandang difabel di masa pandemi covid-19 ini? Apa saja tantangan yang harus mereka hadapi?

N: Pandemi Covid-19 ini benar-benar mengguncang semua lini. Teman difabel harus berjuang untuk bertahan hidup di tengah guncangan ekonomi, keterbatasan dan simpang-siurnya informasi, hingga mereka teramat sangat kecewa ketika tahu Menteri Sosial diduga korupsi dana bansos. Cerita pilunya banyak sekali.

P: Menurut mbak, bagaimana respon dan kinerja pemerintah selama pandemi covid-19 berlangsung? Lalu, bagaimana kinerja pemerintah terhadap kelompok difabel?

N: Aku tidak bisa memberikan pendapat pribadi. Sebab di sini aku mewakili Tempo, dan sikap Tempo tentang bagaimana kinerja pemerintah selama pandemi Covid-19 sudah terangkum dengan jernih di setiap editorial. Silakan Teresia baca lewat link kolom.tempo.co di rubrik tajuk atau opini.

P: Apa Kanal Difabel Tempo.co memberi perhatian khusus pada difabel selama pandemi covid-19? Kalau iya, dalam bentuk apa?

N: Kami memberi perhatian kepada teman difabel selama pandemic Covid-19 dalam bentuk pemberitaan.

P: Selama ini, bagaimana mbak menilai bahwa narasumber yang ada di berita layak untuk ditampilkan?

N: Merujuk pada kriteria layak narasumber sebagaimana tertuang dalam ilmu jurnalistik.

P: Pernah dapat feedback tidak dari pembaca, narasumber, maupun pihak-pihak yang terkait dengan pemberitaan difabel di masa pandemi covid-19? Bentuk feedbacknya apa saja?

N: Pernah. Mereka menyarankan jumlah tulisan/kontennya ditambah, cakupan isunya lebih luas dan beragam. Tentu kami berusaha untuk memenuhi itu. Ada juga yang memberikan masukan tentang user interface yang agak mengganggu untuk difabel netra, misalkan soal pop up iklan. Sudah kami sampaikan juga ke bagian IT.

P: Bagaimana pembagian pemberitaan yang berasal dari daerah-daerah di Indonesia? Apa ada kuota khusus untuk berita di luar Jabodetabek dan pulau Jawa?

N: Selama teman-teman koresponden memberikan laporan, tulisannya memenuhi standar nilai berita, dan penulisannya jelas, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak menayangkan laporan tersebut.



TRANSKRIP WAWANCARA DIDIT HARIYADI

Tanggal: 25 Desember 2020

Via: WhatsApp

P: Background narasumber: jurusan kuliah, bagaimana awal mula tertarik pada bidang jurnalistik?

N: Jurusan ilmu pendidikan di UIN Alauddin Makasar. Awalnya saya tidak terlalu tertarik dengan dunia jurnalistik cuman karena saya hobi traveling dan tantangan, sehingga saya mencoba masuk ke dunia jurnalistik. Jadi saya tidak bergelut sesuai dengan background saat kuliah lantaran terikat oleh waktu. Sementara pemikiran saya harusnya kan saya yang mengatur waktu bukan sebaliknya. Kemudian seiring berjalannya waktu akhirnya saya jatuh cinta dengan profesi ini.

P: Bagaimana perjalanan karir mas sebelum menjadi jurnalis di Tempo?

N: Sejak di kampus sampai selesai kuliah saya aktif main bola sambil *touring* menggunakan sepeda motor. Kemudian bekerja di salah satu lembaga survey sekitar tiga tahunan. Kemudian ada lowongan kerja jadi jurnalis di Biro Tempo Makassar tahun 2013, saya pun mencoba tantangan baru dan akhirnya diterima dan sampai sekarang masih bertahan.

P: Apakah mas hanya menulis tentang isu disabilitas, atau isu lain juga menulis?

N: Kalau saya semua isu saya tulis, bukan hanya soal difabel saja, tapi lingkungan, HAM, keberagaman, korupsi dan lainnya.

P: Apakah pemilihan isu yang ditulis sesuai permintaan redaktur/editor atau inisiatif sendiri?

N: Khusus untuk isu difabel di masa pandemi, itu adalah ide saya sendiri yang kebetulan ada fellowship UNICEF bekerja sama dengan AJI Indonesia dan saya termasuk salah satunya yang lolos.

P: Mengapa mas tertarik menulis isu disabilitas?

N: Ketertarikan saya muncul karena awal pandemi menyerang Indonesia, khususnya Makassar, saya melihat pemerintah hanya fokus membantu masyarakat biasa bukan kelompok rentan, padahal mereka dua kali lipat lebih rentan terpapar ketimbang yang lainnya.

P: Mengenai status mas sebagai kontributor Tempo Sulawesi Selatan, apakah menjadi kontributor sama dengan jurnalis yang berkantor di Jakarta? Skema kerjanya seperti apa? Apakah ada target tulisan yang harus dikirim?

N: Bedalah, kalau yang berkantor di Jakarta statusnya adalah karyawan, kalau ada kontributor itu paling satu atau dua orang saja. Dari segi pekerjaan juga berbeda, misalnya reporter yang desk di pemerintahan itu hanya fokus liputan disitu saja, sedangkan kalau saya itu beragam desk. Target tulisan pun berbeda dengan teman yang di Jakarta karena mereka harus mengisi halaman yang disiapkan, sementara saya tidak.

P: Bagaimana proses produksi berita yang selama ini mas lakukan?

N: Saya hanya liputan sesuai isu yang menurutku laik untuk dimuat kemudian mengirimnya ke *news room* setelah itu editor yang publis

P: Bagaimana mas memandang difabel di Kota Makassar, Sulsel selama pandemi covid-19 ini? Apa saja hambatan yang harus mereka rasakan?

N: Awal pandemi, teman-teman difabel terlihat sangat kesulitan mengakses informasi terkait Covid-19, bagaimana penyebarannya dan bahayanya seperti apa. Akhirnya mereka mencari informasi sendiri, baik dari temannya atau jejaring dari NGO lain untuk mengantisipasi virus ini.

Akses informasi terutama saat pemerintah setempat lakukan webinar disitu tak disiapkan penerjemah untuk teman difabel, sehingga sulit memahaminya. Lain lagi pembagian bantuan baik masker ataupun hand sanitizer yang sulit mereka dapatkan.

P: Bagaimana mas memandang kinerja pemerintah Kota Makassar terkait penanganan pandemi ini? Lalu bagaimana penanganannya terhadap difabel?

N: Masih buruk karena pemerintah terlihat kebingungan akhirnya pelbagai aturan dikeluarkan tidak jelas selalu berubah-ubah, akibatnya masyarakat mengacuhkan virus ini.

Kalau soal difabel tak ada penanganan khusus, pemerintah setempat sapu rata dalam penanganannya.

P: Selama ini bagaimana mas memilih narasumber? Apakah di setiap berita harus menampilkan dua pihak yang berlawanan?

N: Untuk narasumber, saya memang awalnya membuat TOR siapa saja yang terkena dampak di masa pandemi ini. Karena saya juga harus objektif dalam hal penulisan, maka saya juga memberikan ruang kepada pemerintah/penanggung jawab supaya cover both side.

P: Pada artikel berita Disabilitas, Informasi, dan Lingkup yang Kian Sempit Kala Pandemi Covid-19, mas menulis cukup panjang. Dalam berita tersebut, mas menampilkan 8 narasumber. Mengapa mas menampilkan narasumber sebanyak itu? Apakah mas menemui langsung narasumber-narasumber tersebut?

N: Karena tulisan ini adalah indepth reporting sehingga membutuhkan narsum yang cukup banyak untuk mengetahui lebih jelas sejauh mana dampak pandemi. Kalau narsum ada saya temui langsung dan ada ada juga wawancara via telepon.

P: Menurut mas, apakah berita perlu menampilkan sebuah solusi?

N: Iya dan biasa solusi itu di dalam naskah diambil dari komentar ahlinya atau orang yang berkompeten

P: Menurut mas, berita yang tepat menggambarkan disabilitas itu seperti apa?

N: Menggunakan istilah yang relevan dan tidak melenceng supaya mereka tidak terstigma negatif di masyarakat. Misalnya tidak menggunakan istilah lumpuh melainkan penyandang disabilitas fisik. Lebih mengangkat bagaimana mereka bergaul di lingkungannya atau apa yang dia lakukan, lebih kepada keatifannya di masyarakat bukan disabiitasnya.

P: Apakah mas pernah mendapat feedback dari pembaca, narasumber, maupun pihak terkait setelah berita yang mas tulis tentang difabel di masa pandemi?

N: Iya, pembaca/narasumber lebih mengetahui kondisi penyandang disabilitas di tengah pandemi. Akhirnya setiap ada kegiatan saat webinar itu disiapkan penerjemah.



TRANSKRIP WAWANCARA PRIBADI WICAKSONO

Tanggal: 28 Juli 2021

Via: Telepon

P: Apa yang melatarbelakangi mas membuat artikel “Cara Himpunan UMKM Difabel Bertahan di Tengah Pandemi”?

N: Kalau menarik karena ada kaitannya dengan humaniora, kemanusiaan. Nah kalau nilai beritanya tinggi ya layak ditulis. Artinya itu kan bukan seremoni, bukan acara partai politik, bukan acara pencitraan. Ini lebih ke kemanusiaan dengan keterbatasan. Bagaimana difabel mempunyai keterbatasan fisik, mereka punya dampak ekonomi. Nilai beritanya jadi lebih banyak dibanding acara-acara seremoni, misalnya peresmian acara apa. Kalau ke pemerintah kan berarti nilai beritanya lebih ke kebijakan, kalau masyarakat kan lebih ke aktivitas mereka. Itu bisa jadi nilai berita. Gak cuma soal tapi bagaimana menyiasati.

P: Apakah di Tempo ada ketentuan apa saja topik-topik yang harus diangkat ketika menulis disabilitas? Apakah ada panduan untuk meliput disabilitas?

N: Oh nggak ada. Karena etika jurnalistik yang perlu dihindari adalah menulis berita bohong bahwa tidak ada peristiwa terus ditulis. Tapi kalau seperti itu kan narasinya jelas. Artinya narasumbernya jelas, omongannya bisa dipertanggungjawabkan. Aku melihatnya bahwa mereka memang cacat. Ya istilahnya gak kayak orang biasa. Artinya dia gak bohong, dan kemudian dia punya aktivitas yaudah dia layak ditulis. Tidak ada aturan-aturan tertentu untuk menghindari. Kecuali gak terlalu mengangkat sisi-sisi kelemahan dia, tapi lebih mengangkat sisi apa yang bisa dia lakukan.

P: Berarti gak ada panduannya ya mas?

N: Oh gak ada. Itu lebih ke kedalaman saja. Kedalaman wartawan bekerja terus dia lebih fokus ke apa. Itu yang diangkat.

P: Apakah ada pelatihan khusus untuk jurnalis Tempo? Misalnya kerja sama dengan komunitas difabel?

N: Oh nggak ada. Tapi mungkin teman-temanku ikut pelatihan gitu. Tapi kalau aku nggak. Aku mengalir saja. Ini punya nilai berita, kalau nanti tak beritakan nanti dampaknya apa, terus nanti dari sisi kemanusiaan efeknya bagaimana. Kalau aku bukan pelatihan-pelatihan formal di ruang formal gitu tapi lebih ke pendekatan emosional sih aku. Misalnya ketika aku nulis Ojek Difabel yang di Jogja, Difa Bike itu aku sudah kenal deket banget sama ketuanya. Gak cuma hubungan wartawan sama narasumber, tapi sudah aku sering diundang ke nikahan dia, acara syukuran, yang gak harus tak tulis beritanya. Dari situ kedekatannya sudah terbangun. Jadi mendekati narasumber itu gak cuma anggap dia sebagai narasumber, tapi membangun emosionalnya. Jadi kalau ada apa-apa dia yang nginfo. “mas aku ada ini, tolong diangkat bisa gak?” misal dia lagi gelar vaksinasi untuk difabel, terus dia membuat bantuan untuk difabel yang terdampak, seperti itu. Gak ada pelatihan-pelatihan khusus. Itu tergantung insting. Oh dia ini gak mau diposisikan, aku ini cacat dia engga, dia gak mau kayak gitu. Ya kita sama-sama lah.

P: Kalau untuk pemilihan diksi? Apa ada yang perlu dihindari?

N: Oh kalau itu ada. Biasanya kan ada ketentuan-ketentuan dari organisasi, misalnya aku di situ gak pakai kata “penyandang cacat” lagi. Karena itu istilahnya sudah tidak relevan. Karena itu dulu kan semangatnya bukan untuk universalitas ya. Bukan semangat untuk memberdayakan. Kalau memberdayakan harusnya sudah gak “penyandang cacat”. Itu bikin jarak antara pembaca yang normal dengan yang gak normal. Kalau kamu penyandang cacat berarti aku normal. Itu yang harus dihindari. Oh dia difabel, disabilitas, berarti ada satu fungsi, atau dua, atau lebih tubuh yang tidak berfungsi. Tapi secara mental dia tetap manusia. Artinya kalau cacat itu sangat diskriminatif terhadap tubuh dia. Itu yang lebih tak hindari, seperti diksi “penyandang cacat”, terus soal ranah-ranah pribadi yang gak perlu dibuka.

P: Contohnya ranah pribadi gimana mas?

N: Ya misalnya kehidupan cinta dia, pasangannya selingkuh. Aku gak ke situ. Kita gak pernah. Aku lebih ke interaksi dia ke masyarakat, bukan interaksi dia ke keluarganya. Itu aku gak urusin. Misal agamamu apa itu juga gak.

P: Kriteria topik disabilitas yang penting bagi publik?

N: Penting bagi publiknya bahwa apa yang dilakukan disabilitas bisa dilakukan oleh orang lain, bisa dilakukan oleh disabilitas lain. Makannya aku tulis sebagai inspirasi. Misalnya kenapa aku di jogja nyorot banget soal ojek difabel itu, cara dia mengoperasikan, cara dia memodifikasi motor, cara dia menerapkan tarif, cara dia memilih recruitment karyawan, seperti itu tu aku buat sebagai panduan untuk daerah lain. Dan ternyata dari jogja itu dicontoh di madiun, dicontoh di kalimantan itu ojek difabel. Jadi apa yang bisa dia lakukan, belum dilakukan oleh orang lain. Mungkin difabel lain belum dapet info itu. Setelah baca tulisan yang aku bikin, mungkin di sana oh bisa, cara memodifikasi kendaraan seperti ini yang lebih aman, oh cara dia recruitmen karyawan seperti ini, oh cara dia manajemen perusahaan seperti ini. Termasuk kelompok difabel yang lain misal UMKM itu cara dia belanja bahan bagaimana, cara dia distribusi pemasaran gimana, seperti itu. Jadi lebih ke topik-topik yang dapat menginspirasi orang lain. Bukan bombastis. Kalau aku lebih ke menemukan apa yang orang lain belum dapat, apa yang orang lain belum ketahui. Misalnya ternyata cuma dari mecah batu itu difabel di Sleman itu bisa bikin pabrik. Nah itu bukan bombastis, tapi menggali banyak sisi yang belum diketahui orang lain. Jadi seolah-olah bombastis padahal enggak. Oh ternyata di situ bisa merekrut 500 karyawan, itu bukan bombastis tapi hal yang belum banyak diketahui. Oh caranya gimana. Kalau bombastis yang gak ada isinya itu gak bisa di Tempo.

P: Kepentingan publiknya berarti lebih ke sesama difabel ya mas, bukan ke perbaikan kebijakan pemerintah?

N: Ya itu satu kaitan. Artinya misal difabel yang ojek online itu. Itu bisa dicontoh oleh difabel lain, tapi di sini itu kita mendapatkan dukungan dari pemerintah kotanya. Nah di sana, difabel yang di kalimantan atau malang jadi pemerintahan kotanya harus mau gak mau kalau difabel di sana menuntut untuk kendaraan

bermotor harus ijin lisensi operasional misalnya, di sana ya akan membantu dengan kebijakan. Ya itu untuk mempengaruhi kebijakan juga. Jadi sasaran tembaknya bukan cuma difabel, tapi juga ke pemerintahnya.

P: Mas sudah berapa lama di Tempo?

N: Baru 10 tahun.

P: Dulu lulusan apa mas?

N: Teknik Informatika saya. Atma Jaya.

P: Berarti lulus langsung di Tempo ya?

N: Nggak. Di Harian Jogja dulu setahun.

P: Menurut mas, di setiap artikel yang mas tulis harus menampilkan solusi gak?

N: Lha iya no. Harus. Artinya kalau difabel mengeluhkan ini tak tanya ke pemerintahnya ini solusinya apa. Pemerintahnya jadi narasumber kedua. Ada permasalahan di lapangan seperti ini terus kemudian pemerintah sikapnya apa. Yaudah nanti tinggal mengawal omongannya pemerintah itu bener atau cuma janji-janji kosong.

P: Menurut mas, kondisi difabel di Jogja selama pandemi covid-19 ini seperti apa?

N: Ya sangat terdampak. Aku tahu itu karena temenku yang ngelola ojek difabel itu seminggu pakai ojek yang dimodifikasi untuk ojek online difabel dia bisa ngantar turis manca dari sini sampai ke Borobudur. Terus nganter orang sesama difabel ke rumah sakit pakai motornya dia. Lha sekarang mau periksa rumah sakit kan susah banget. Ojeknya dia jadi mati juga karena gak ada difabel yang nyewa ojek dia untuk ke rumah sakit. Wong rumah sakit penuh semua gitu.

P: Kalau untuk kinerja pemerintah gimana mas?

N: Ya kalau pemerintah sudah bergerak tapi lebih ke sisi kuratif ya. Sisi kuratif itu artinya baru anggaran-anggaran, dan bantuan. Tapi belum memberikan hak yang rata untuk misalnya akses kesempatan kerja. Itu mungkin ada aturannya tapi belum

mengikat. Jadi aturannya baru bersifat himbauan. Kalau di luar negeri, atau di Indonesia bagian lain, kalau di Jogja itu belum ada misalnya kuota untuk pekerja difabel itu berapa, misal perusahaan menolak difabel itu dikenai sanksi. Itu kan belum bisa kalau pemerintah di sini. Jaminan-jaminan itu yang membuat mereka cuma kerja di sektor informal, tidak banyak yang kerja di sektor formal termasuk PNS. PNS kelihatannya baru tahun ini kalau gak salah. Seleksi PNS diikuti difabel yang masih ringan.

P: Mas pernah dapat feedback setelah menulis soal difabel di masa pandemi? Misal, kebijakannya jadi berubah?

N: Kalau soal itu belum ya. Pemberitaan terkait difabel kan prosesnya panjang. Artinya harus ada kesepakatan dari DPRD, harus ada gerakan dari masyarakatnya, baru pemerintah akan tergerak. Tapi pemerintah akan tergerak pun mereka juga bergantung, dari daerah bergantung dengan pusat, misalnya. Artinya kalau lingkungannya masih regional seperti ini ya kita berusaha mengetuk-ngetuk terus agar ini gimana, ini gimana, di update terus. Karena proses birokrasi itu gak semuanya bisa cepat. Kecuali aku nulis soal Malioboro ada warung nudog (?) misalnya. Nah itu perintahnya langsung tutup esok harinya. Nah kalau kebijakan untuk difabel itu kan kebijakan jangka panjang, bukan jangka panjang tapi butuh proses panjang, artinya harus dari Perda, Perda menginduk pada UU, UU yang membuat pusat. Kalau misal Perda di sini membuat sesuatu tapi gak ada cantolan hukum di UU ya tidak bisa.

P: Mas kalau mau nulis isu disabilitas konsul dulu ke redaktur?

N: Iya konsul, atau langsung nulis sendiri. Biasanya konsul itu kalau aku nulis misal difabel yang ada kaitannya dengan otomotif, modifikasi motor. Nah itu aku konsul sama redaktur otomotif. Apa yang terkait dengan lisensi, APPM (?) APPM itu pemegang merk Honda. Misal motor harus dimodifikasi itu standar-standarnya seperti apa. Nah modifikasi yang dilakukan oleh difabel itu menyalahi aturan gak.

P: Proses produksi berita yang mas lakukan itu seperti apa?

N: Ya dari awal aku misal dapat informasi aku klarifikasi dulu, klarifikasi terus aku cari info tambahan lain, habis itu aku buat janji wawancara, habis wawancara aku tulis, aku konsultasikan dulu ke redaktur apa kurang atau engga, nanti redaktur kasih saran masukan apa nanti yang kurang aku konfirmasi ke narasumber, kemudian tambahannya apa perluasan temanya apa, misal isunya bisa ditarik ke sini. Dari redaktur kasih arahan ke sini aku cari narasumber lainnya untuk melengkapi. Habis itu aku kirim lagi ke redaksi terus ditayangkan.



Corona, Presiden Jokowi Mesti Perhatikan Difabel di Panti Sosial

Reporter:

Cheta Nilawaty P.

Editor:

Rini Kustiani

Minggu, 29 Maret 2020 10:00 WIB



Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengikuti forum KTT Luar Biasa G20 secara virtual dari Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis, 26 Maret 2020. Dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan bahwa G20 harus memotori gerakan solidaritas dunia dalam penanganan virus corona agar pandemi tersebut tidak mengganggu kemitraan dan kerja sama yang sudah dibangun antar anggota selama bertahun-tahun. Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr

TEMPO.CO, Jakarta - Penyandang disabilitas yang tergabung dalam Perhimpunan Jiwa Sehat mendesak Presiden Joko Widodo lebih memperhatikan kondisi **difabel** mental intelektual yang berada di panti sosial saat wabah corona. Permintaan ini disampaikan melalui surat yang dikirimkan Perhimpunan Jiwa Sehat pada Kamis, 26 Maret 2020.

"Kondisi penyandang disabilitas mental terutama yang berada di panti-panti swasta ini sangat rentan," kata Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat, Yeni Rosa Damayanti kepada Tempo, Sabtu 28 Maret 2020. Difabel mental intelektual yang ditempatkan di panti swasta umumnya tinggal berdesakan dalam bangsal

yang dihuni hingga 50 orang. Di beberapa tempat, mereka tidur, makan, sampai buang air besar atau kecil di tempat yang sama.

Data Perhimpunan Jiwa Sehat menunjukkan terdapat sekitar 3.000 penyandang disabilitas mental yang ada di tiga panti sosial milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan ratusan yang berada di dalam panti-panti milik swasta. Sedangkan di Kota dan Kabupaten Bekasi ada ribuan penyandang disabilitas mental yang berada dalam panti-panti sosial milik swasta.

Perhimpunan Jiwa Sehat mengkhawatirkan kondisi penghuni panti yang memiliki penyakit bawaan, namun harus tinggal berdesakan dan berdekatan satu sama lain. Selain penyakit bawaan, nutrisi yang diterima penghuni panti tidak selalu memenuhi kebutuhan gizi sesuai standar kesehatan untuk menjaga daya tahan tubuh. "Kondisi kian mengkhawatirkan manakala penghuni panti-panti sosial pada umumnya tidak memiliki akses informasi mengenai virus **corona**," ujar Yeni.

Jika kondisi itu dibiarkan tanpa perhatian dari pemerintah, menurut Yeni, maka ribuan penyandang disabilitas mental intelektual di dalam panti-panti itu terancam jiwanya karena berpotensi terinfeksi virus corona.

Dalam surat kepada Presiden **Joko Widodo** itu, Perhimpunan Jiwa Sehat juga memaparkan dasar hukum yang perlindungan bagi penyandang disabilitas oleh pemerintah dalam menghadapi wabah corona. Pemerintah wajib memenuhi hak atas kesehatan (right to health) fisik dan mental setiap orang tanpa kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights-ICESCR).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 20 mengamanatkan penyandang disabilitas berhak mendapatkan informasi, pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana, mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana, serta mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses.

Perlindungan bagi penyandang disabilitas ini juga diperkuat dalam CRPD Pasal 11 yang mewajibkan negara mengambil semua kebijakan yang diperlukan untuk menjamin perlindungan dan keselamatan penyandang disabilitas dalam situasi berisiko seperti virus corona baru atau COVID-19 yang menjadi wabah global saat ini.

Cara Perhimpunan UMKM Difabel Yogyakarta Bertahan Selama Pandemi

Reporter

Pribadi Wicaksono (Kontributor)

Editor

Rini Kustiani

Jumat, 26 Juni 2020 10:00 WIB



Perkumpulan pengusaha disabilitas Yogyakarta bertemu Dinas Koperasi dan UMKM DI Yogyakarta pada Kamis, 25 Juni 2020.

TEMPO.CO, Yogyakarta - Sebanyak 500 **difabel** yang bergerak di bidang usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Yogyakarta perlahan mempersiapkan diri menghadapi new normal.

Ketua Perkumpulan Pengusaha Disabilitas Indonesia atau Perpindo DI Yogyakarta, Bambang Susilo mengatakan perekonomian kelompok UMKM harus terus berputar di masa new normal meski pandemi Covid019 belum berakhir.

"Kelompok UMKM difabel di lima kabupaten/kota telah merumuskan strategi dalam upaya pemulihan di masa new normal," kata Bambang Susilo di Yogyakarta, Kamis 25 Juni 2020.

Kelompok UMKM difabel di wilayah Cangkringan, Kabupaten Sleman, menurut Bambang, kini kembali menekuni usaha mereka di bidang pengolahan pasir. Wabah corona yang merebak pada Maret lalu membuat berbagai proyek konstruksi macet.

Kondisi ini mengakibatkan sekitar 25 penyandang disabilitas daksa di lereng Gunung Merapi yang selama ini bekerja sebagai pemecah batu, kehilangan mata pencaharian mereka. Para difabel di lereng Merapi tersebut mengolah bebatuan sisa erupsi menjadi pasir siap jual.

Adapun kelompok difabel di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, ujar Bambang, tengah mengajukan koperasinya menjadi penyedia layanan jasa transportasi di area Bandara Yogyakarta International Airport atau YIA. Koperasi difabel tersebut bakal menggandeng sejumlah mitra untuk menyediakan armada dan membuat layanan informasi bagi wisatawan yang membutuhkan rental kendaraan setiba di bandara.

"Koperasi difabel di Kulon Progo mati suri selama pandemi Covid-19," kata Bambang. Saat ini pengurus koperasi tersebut mengajukan diri dalam layanan rental 30 unit mobil untuk wisata di Bandara Yogyakarta International Airport atau **Bandara YIA**.

Sedangkan di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, Bambang melanjutkan, sejumlah petani dan peternak difabel dapat menjadi pemasok bahan pangan yang langsung disalurkan ke pasar dan konsumen. "Kami akan menggandeng Dinas

Pertanian di Gunungkidul untuk menampung hasil panen dari kelompok petani dan peternak difabel," ujarnya.



Sukirno, petani difabel di lereng Merapi Yogyakarta. TEMPO | Pribadi Wicaksono

Seorang petani difabel asal lereng Gunung Merapi, Sukirno mengatakan selama masa tanam saat pandemi Covid-19 membuat dia kesulitan meneruskan usaha karena pasokan pupuk macet. "Pupuk biasanya diantarkan setiap masa awal tanam, tapi selama pandemi ini sama sekali tidak ada yang memasok," ujar Sukirno yang memiliki lahan setengah hektar itu. Akibat macetnya pasokan pupuk, maka hasil panen pun molor dari jadwal.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM) DI Yogyakarta, Srie Nurkyatsiwi menuturkan kelompok pelaku **UMKM** difabel masih perlu digenjot lebih soal manajerial dalam berusaha. "Kami mendorong pelaku usaha

mikro, kecil, dan menengah difabel ini masing-masing bisa memiliki koperasi supaya lebih kuat dalam usahanya," ujarnya.



Tantangan Guru Mengajar Kelas Inklusi Selama Belajar Jarak

Jauh

Reporter:

Cheta Nilawaty P.

Editor:

Rini Kustiani

Kamis, 4 Juni 2020 13:47 WIB



Ilustrasi kegiatan belajar mengajar di rumah

TEMPO.CO, Jakarta - Kesulitan melaksanakan kegiatan belajar mengajar selama Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB tidak hanya dirasakan oleh peserta didik, namun juga para guru. Terutama untuk kelas **inklusi**, para guru harus memodifikasi cara penyampaian materi sekaligus bekerja sama dengan orang tua atau pendamping siswa berkebutuhan khusus.

Yayasan Wahana Inklusif Indonesia menunjukkan hasil penelitian mereka tentang apa saja tantangan yang dialami oleh para guru selama mengajar para siswa berkebutuhan khusus lewat daring. Ketua Yayasan Wahana Inklusif Indonesia, Tolhas Damanik menyatakan pada prinsipnya kegiatan belajar mengajar inklusif adalah amanat Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional

dan Undang-undang Penyandang Disabilitas, serta tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pendidikan Inklusif.

"Semua ketentuan itu memuat peran aktif guru dalam kegiatan belajar mengajar secara inklusif, termasuk saat mengajar secara daring," kata Tolhas Damanik dalam diskusi mengenai pendidikan inklusif selama pandemi Covid-19 pada Jumat, 22 Mei 2020. Beberapa tantangan dan kesulitan yang dihadapi guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara inklusif melalui media daring, pertama keterbatasan waktu untuk mengeksplorasi materi pelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus.

Tantangan kedua adalah keterbatasan pengetahuan dan keterampilan pengajaran jarak jauh yang inklusif bagi peserta didik dengan **disabilitas**. Tolhas melanjutkan, hambatan ketiga yang dialami guru ketika melaksanakan pendidikan inklusif jarak jauh adalah keterbatasan keterampilan dan pengetahuan mengenai penggunaan alat komunikasi yang terakses serta keterbatasan pengembangan media dan materi pembelajaran yang terakses.

Hambatan keempat adalah keterbatasan kemampuan pengembangan strategi pelibatan orang tua atau pendamping dan lingkungan dalam kegiatan belajar mengajar secara inklusif bagi peserta didik dengan disabilitas.

Sebab itu, Yayasan Wahana Inklusif Indonesia merekomendasikan pemerintah agar mengeluarkan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif saat pandemi dan setelah wabah corona berakhir. Pemerintah sebaiknya dapat menyelenggarakan program pelatihan dan membuat panduan bagi guru dalam merancang pendidikan inklusif bagi peserta didik dengan disabilitas di rumah.

"Pemerintah juga diharapkan dapat memberikan panduan bagi orang tua dalam melakukan pendampingan tentang memanfaatkan media pembelajaran adaptif untuk peserta didik dengan disabilitas," kata Tolhas Damanik. "Dan satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah pengembangan skema komunikasi guru dan orang tua dalam pendidikan inklusif dari rumah."

Tolhas Damanik menekankan perlunya aksesibilitas terhadap beberapa fasilitas pembelajaran, seperti media pembelajaran adaptif yang juga mudah dimengerti oleh guru dan orang tua. Penting juga hotline atau layanan pengaduan selama kegiatan belajar mengajar dilakukan dari rumah.

Disabilitas, Informasi, dan Lingkup yang Kian Sempit Kala Pandemi Covid

Reporter:

Didit Hariyadi (Kontributor)

Editor:

Rini Kustiani

Kamis, 10 September 2020 10:00 WIB



Ilustrasi penyandang disabilitas atau difabel. REUTERS | Rafael Marchante

TEMPO.CO, Makassar - Andi Ukhrawi tahu pandemi **Covid-19** tengah berkecamuk di seluruh penjuru, termasuk Indonesia sejak pertengahan maret 2020. Gara-gara pagebluk, siswa sekolah luar biasa kelas IX di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, itu tak lagi bisa berangkat ke sekolah. Dalam sepekan, dia hanya satu kali berinteraksi dengan gurunya lewat video daring.

Remaja dengan disabilitas wicara ini pun tak leluasa ke luar rumah. Rutinitas salat lima waktu di masjid kini dilakukan di rumah. Harus pakai masker, rajin cuci tangan, dan menjaga jarak satu sama lain yang tentu sulit diterapkan saat dia harus ditemani pendamping. Dari semua aktivitasnya yang mendadak berubah, ada satu pertanyaan di benak Andi, sebenarnya apa itu Covid-19?

Kakak Andi Ukhrawi, Andi Maya, mencoba menjelaskan segala sesuatu yang ingin diketahui adiknya tentang Covid-19 sejauh yang dia tahu dan bisa. Musababnya, menurut dia, belum ada sosialisasi tentang Covid-19 khusus untuk difabel di pemerintah Kota Makassar. "Yang penting kami selalu menjaga dan mengawasinya, khawatir tertular," kata Maya kepada Tempo, Kamis 27 Agustus 2020.

Seorang difabel netra, Muhammad Luthfi tahu tentang Covid-19 dari teman-temannya dan mendengarkan berita. Menurut dia, edukasi atau sosialisasi tentang Covid-19 dari pemerintah belum efektif karena tak melibatkan organisasi difabel atau guru sekolah luar biasa. Akibatnya, banyak penyandang disabilitas yang tak tahu apa dan dampak dari Covid-19.

Luthfi menjelaskan, penyandang disabilitas sensorik, yakni tuli dan netra paling terhambat dalam mendapatkan informasi. Berbagai media tayang atau informasi tentang virus corona baru ini belum terakses oleh aplikasi pembaca layar, alat penerjemah bahasa isyarat, subtitle, dan close caption. Padahal, kelompok difabel termasuk paling rentan terpapar Covid-19.

Menurut Luthfi, difabel tuli dan netra yang beraktivitas dengan pendamping kesulitan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah Covid-19, khususnya ketentuan menjaga jarak satu sama lain. "Tidak mungkin saya menjaga jarak dengan pendamping sejauh tiga meter," kata pria 30 tahun ini.

Direktur Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan atau PerDIK, Abdul Rahman menganggap Pemerintah Kota Makassar mengabaikan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas dalam sosialisasi informasi tentang Covid-19. "Pemerintah hanya fokus pada masyarakat, melupakan kelompok rentan, yakni penyandang disabilitas," kata Abdul Rahman saat ditemui Tempo di kantornya di Kabupaten Gowa, Selasa 18 Agustus 2020.



Direktur Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan atau PerDIK, Abdul Rahman. TEMPO | Didit Hariyadi

Keterbatasan informasi tentang virus corona baru bagi difabel, misalkan terjadi ketika jumpa pers virtual yang tanpa kehadiran penerjemah bahasa isyarat. Abdul Rahman membandingkan dengan Pemerintah Kota Surabaya yang menyederhanakan bahasa bagi disabilitas agar mudah dipahami. Begitu juga dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang telah menginformasikan tentang Covid-19 melalui penyederhanaan bahasa.

Kurangnya informasi dari pemerintah tentang apa dan bagaimana Covid-19 membuat difabel mencari sendiri, dan tak jarang terjebak pada informasi yang keliru atau hoax. "Akhirnya kami mengetahui apa isi protokol kesehatan itu dari daerah lain," ucap Abdul Rahman. Dia pun menyampaikan informasi tersebut kepada berbagai kelompok difabel sesuai dengan ragam disabilitasnya.

Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Sulawesi Selatan, Maria Un mengatakan seharusnya **difabel** menjadi prioritas dalam penanganan Covid-19. "Sebab mereka jauh lebih rentan tertular ketimbang non-difabel," katanya. Contoh difabel netra yang menggunakan perabaan untuk mengidentifikasi benda dan membutuhkan pendampingan. Mereka harus tahu

dan memahami isi protokol kesehatan untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitarnya.

"Sosialisasi itu penting sekali sehingga mereka mendapatkan informasi yang benar," katanya. Tak cukup sosialisasi tentang Covid-19 ke berbagai kelompok masyarakat, Maria Un menyarankan pemerintah juga memperhatikan bagaimana supaya alat bantu yang dipakai penyandang disabilitas bersih dari virus.

PerDIK dan HWDI yang berinisiatif turun ke lapangan untuk melakukan sosialisasi pencegahan Covid-19 kepada penyandang disabilitas mengaku sulit menjangkau seluruh difabel. Alasannya, minim alat pelindung diri sehingga mereka juga berpotensi tertular Covid-19. Hingga Ahad, 6 September 2020, jumlah kasus Covid-19 di Kota Makassar sebanyak 7.103 orang. Di antaranya 1.800 orang dirawat, 5.046 orang yang sembuh, dan 257 meninggal.

Ketua Satuan Tugas Penegakan Disiplin Covid-19 Makassar, Muhammad Sabri mengatakan selalu melakukan sosialisasi protokol kesehatan, termasuk untuk penyandang disabilitas. "Kami melibatkan satuan tugas hingga ke tingkat rukun tetangga dan rukun warga atau RT dan RW," katanya. Hanya saja, Sabri mengaku belum maksimal karena tiada peraturan daerah yang menjadi payung hukum dan panduan. "Kami tetap lakukan penegakan protokol kesehatan," ucap Sabri. Untuk kecamatan atau kelurahan yang masih menjadi episentrum, langsung dilakukan tes usap secara massal.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Makassar, Ismail Hajiali mengatakan masing-masing organisasi perangkat daerah punya peran untuk sosialisasi pandemi. Misalkan dinas komunikasi dan informatika melakukan sosialisasi melalui media televisi, cetak, dan online. Di tingkat kelurahan, sosialisasi protokol Covid-19 dilakukan dengan pembekalan kepada ketua-ketua RT dan RW serta dinas sosial pendamping difabel. "Khusus **penyandang disabilitas**, kami juga melibatkan aktivis difabel," kata dia.

Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas PPPA Kota Makassar, Makmur mengaku sulit menerapkan protokol perlindungan bagi disabilitas karena butuh pendamping yang bisa memahami mereka. Selama ini, pemerintah terkendala peran perantara, seperti penerjemah bahasa isyarat atau pendamping untuk melakukan sosialisasi terkait pandemi Covid-19 kepada difabel.

Dinas PPPA kemudian menjalankan instruksi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melibatkan aktivis difabel dalam melakukan sosialisasi protokol kesehatan mencegah penyebaran Covid-19. Mereka yang menyampaikan segala informasi tentang Covid-19 sehingga mudah dipahami oleh difabel sesuai dengan ragam disabilitasnya. "Metode sosialisasi ini memanfaatkan beragam sarana, mulai dari media sosial, temu virtual, sampai turun langsung ke lapangan," katanya.

Data Persatuan Penyandang Disabilitas Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan jumlah difabel di Kota Makassar sebanyak 2.250 orang. Rinciannya, 1.794 penyandang disabilitas fisik, 242 penyandang disabilitas mental, dan 214 penyandang disabilitas fisik dan mental.

